

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Birokrasi pemerintahan merupakan suatu kata yang tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sudah sangat populer dalam kehidupan sehari-hari. Birokrasi pemerintah merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk melaksanakan berbagai peraturan dan kebijakan yang menyangkut masyarakat dan setiap warga negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia kita akan selalu berurusan dengan birokrasi. Oleh karena itu, birokrasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. (Dwiyanto, 2005:95)

Setiap warga negara sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia kita akan selalu berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Sejak masih kecil sewaktu masih berada dalam kandungan, kita sudah di periksa oleh pukesmas atau rumah sakit yang memperoleh subsidi dari pemerintah. Ketika lahirpun kita harus mempunyai akta kelahiran dan jalan satu-satunya untuk mendapatkannya adalah dengan berurusan dengan birokrasi kecamatan. Demikian juga ketika kita sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi, institusi berlabel negeri masih menjadi prioritas utama. Pada saat berangkat dewasa kita membutuhkan KTP yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Di samping itu, kita juga memerlukan jasa pelayanan air minum (PDAM), listrik (PLN), telepon (Telkom), bahan bakar (Pertamina), dan lain-lain. Setiap orang pasti mempunyai kewajiban membayar pajak kepada birokrasi pemerintahan. Sampai meninggal pun kita masih berurusan dengan birokrasi pemerintahan yaitu pihak keluarga harus mengurus surat kematian untuk mendapat kapling di TPU (Tempat Pemakaman Umum). (Dwiyanto, 2005:96)

Menurut Widodo (2008:2) kewajiban utama dari birokrasi pemerintahan adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat (*public services*). Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah merupakan perwujudan dari fungsi dari aparatur negara, sebagai abdi masyarakat di samping juga sebagai abdi negara. Pelayanan publik yang ada adalah untuk mewujudkan tujuan bangsa seperti yang diamanatkan dalam alenia IV Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan bangsa tersebut khususnya pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pembangunan di sektor pendidikan menjadi bagian yang sangat penting. Hal itu masih ditegaskan lagi dalam pasal 31 (1) bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sedangkan ayat (2) menegaskan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem nasional yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebagai penjabaran pasal tersebut lahirlah diantaranya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 ini di jelaskan bahwa :

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Selain itu dalam pasal 5 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang tersebut juga di sebutkan tentang hak warga negara dalam bidang pendidikan yaitu :

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan itu sangatlah penting bagi setiap individu, masyarakat, bangsa dan negara. Pada dasarnya pendidikan itu upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan membawa perubahan yang sangat besar bagi ketercapaian bangsa yang ideal. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan mampu mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang modern, maju dan sejahtera. Dengan pendidikan maka bangsa Indonesia akan mempunyai keunggulan dan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, agar negara kita bisa tetap bertahan pada era globalisasi ini.

Akan tetapi, sampai pada saat ini pembangunan bidang pendidikan di Indonesia masih terganjal dengan adanya berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan. Pada kenyatannya kesempatan memperoleh pendidikan belum dirasakan oleh semua warga negara kita. Hal ini tecermin pada permasalahan buta aksara yang sampai saat ini belum terselesaikan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2008, posisi kebutaaksaraan penduduk Indonesia secara nasional sebanyak 10,16 juta atau sekitar 6,22 persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo, pemerintah bertekad menurunkan angka buta aksara. Pemerintah menargetkan pada akhir 2009 jumlah itu akan turun menjadi hanya tinggal 7,7 juta saja atau 5 % saja. (www.tempointeraktif.com)

Masalah pendidikan sekarang ini sudah menjadi isu global. Artinya banyak negara menyadari bahwa masalah pendidikan ini bukan lagi menjadi masalah domestik namun harus dipecahkan bersama. Hasil forum pendidikan dunia yang diselenggarakan di Dakar, Senegal yang akhirnya melahirkan kesepakatan Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua (PUS) adalah bukti untuk itu. Ada enam poin yang disepakati dalam pertemuan itu sebagai kerangka aksi dan komitmen pemerintah berbagai negara dan masyarakat internasional. Kesepakatan itu di antaranya adalah:

1. Perluasan dan peningkatan secara menyeluruh pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini.
2. Memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak (terutama golongan minoritas, anak kurang beruntung) memperoleh akses dan dapat menyelesaikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis.
3. Tercapainya peningkatan sebesar 50 persen dari angka melek huruf orang dewasa (terutama perempuan) pada tahun 2015 dan akses yang sama terhadap pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
4. Memastikan bahwa kebutuhan belajar dari semua pemuda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang merata terhadap program pembelajaran dan kecakapan hidup.

Pendidikan suatu bangsa akan sangat mempengaruhi kualitas suatu bangsa. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh UNDP, *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia berada dalam peringkat 111 dari 177 negara. Ini tentu sangat memprihatinkan kita semua. Yang lebih memprihatinkan lagi, dibanding dengan sesama negara Asean saja masih kalah. Indonesia hanya di atas Vietnam yang kita tahu negara itu baru saja bangkit setelah dilanda perang bersaudara berkepanjangan. Berangkat dari kondisi semacam itulah kemudian pemerintah bertekad untuk melakukan gerakan pemberantasan buta aksara. (www.wawasandigital.com)

Permasalahan buta aksara sangat berkaitan erat dengan kondisi pendidikan jaman dahulu. Kesempatan yang minim, layanan pendidikan yang masih sangat terbatas, serta kondisi geografis yang kurang mendukung mengakibatkan pendidikan menjadi diabaikan. Hal ini juga dipengaruhi pada kesempatan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal mendapatkan pendidikan yang tinggi masih dipermasalahkan. Laki-laki diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk sekolah atau berpendidikan. Hal ini menjadikan jumlah buta aksara pada kaum perempuan menjadi lebih besar jika dibandingkan kaum laki-laki.

Kondisi demikian berdampak pada tingkat kebodohan, kesejahteraan, kemiskinan yang berujung pada rendahnya peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Yang secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dimana usaha-usaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berdaya, seringkali diabaikan begitu saja. Anggapan yang masih melekat pada

masyarakat, bahwa walaupun tidak dapat membaca, menulis dan berhitung, mereka tetap dapat hidup dan mendapatkan uang. Kesempatan yang diberikan pemerintah, kurang mendapat tanggapan dan perhatian dengan baik. Sehingga layanan yang diberikan tidak berjalan dengan optimal.

Dengan semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), menuntut masyarakat untuk terus mengembangkan diri. Prinsip pendidikan sepanjang hayat (*Life Long Education*) menjadi sesuatu hal yang harus ditelaah kembali. Bahwasannya pendidikan itu sangat penting. Karena bagaimanapun mencari ilmu hukumnya wajib. Sehingga perlu dimulai dari dalam kandungan, sampai meninggal dunia. Sarana yang berkembangpun semakin bermacam-macam pula, mulai dari pendidikan formal, non formal maupun informal.

Layanan ini memang diperuntukkan bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidupnya, sehingga mampu bersaing dan berdaya guna. Permasalahan buta aksara harus segera ditangani. Begitu pentingnya masalah buta aksara, hingga di dunia Internasional, salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Masalah kebutuhurufan merupakan salah satu penentu indikator dalam menetapkan tingkat pembangunan sumber daya manusia atau *Human Development Indeks* (HDI). Untuk dapat menuntaskan angka buta aksara di Indonesia, dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen-elemen yang ada sangat dibutuhkan.

Di Kabupaten Karanganyar, pemberantasan buta aksara merupakan salah satu program utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa pada tahun 2009 angka buta huruf penduduk di Karanganyar masih mencapai 18.508 jiwa, sedangkan pada Kecamatan Jumapolo jumlah penduduk yang masih menderita buta aksara mencapai 2.273 jiwa. Pemberantasan buta aksara dilaksanakan dengan menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional bagi warga masyarakat penderita buta aksara. Pendidikan keaksaraan fungsional merupakan salah satu bentuk pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI DAN SD) Kecamatan Jumapolo.

Pemberantasan buta aksara, tidak sekedar mengajarkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta berbahasa Indonesia. Tetapi juga memiliki makna yang luas yaitu sebagai cara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin agar mereka menjadi manusia yang cerdas, sehat, produktif dan mandiri. Mengingat betapa pentingnya pemberantasan buta aksara sebagai prasyarat untuk memperoleh pendidikan yang lebih luas, sehingga pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Pembangunan pendidikan sangat penting karena memberi kontribusi signifikan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Oleh karena itu, di

perlukan komitmen dan kinerja yang sungguh-sungguh dari Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI DAN SD) Kecamatan Jumapolo sebagai birokrasi Pemerintahan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program pemberantasan buta aksara di Karanganyar.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas dapat kita tarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *"Bagaimana kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam pemberantasan buta aksara?"*

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian di kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI DAN SD) Kecamatan Jumapolo adalah :

1. Tujuan objektif
 - a. Untuk kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI DAN SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara.
 - b. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI DAN SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara.
 - c. Untuk mencari solusi hambatan – hambatan yang dihadapi di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI DAN SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara.
2. Tujuan subjektif
 - a. Untuk melengkapi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan dan praktek di lapangan yang sangat berguna bagi penyusun.

D. MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat Akademik
Merupakan informasi untuk kepentingan penelitian lanjutan tentang kinerja birokrasi pelayanan publik khususnya yang menyangkut pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
- b. Manfaat Praktis
Untuk mengetahui kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI DAN SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara. Serta bisa di jadikan pijakan bagi para pengambil kebijakan tentang pelaksanaan

pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

E. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.

1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”. Dalam kamus Illustrated Oxford Dictionary (1998:606), istilah ini menunjukkan “*the execution or fulfilment of a duty*” (pelaksanaan atau pencapaian suatu tugas) atau “*a parson’s echievement under test codition etc*” (pencapaian hasil dari seseorang ketika di uji). (Keban, 2004:192)

Menurut, kamus The New Webster Dictionari dalam buku Sistem Manajemen Kinerja (Ruky, 2002:14) memberikan tiga arti bagi kata *performace* yaitu :

- a. Adalah “prestasi” yang digunakan dalam konteks atau kalimat misalnya tentang “mobil yang sangat cepat” (*high performace car*)
- b. Adalah “pertunjukan” yang biasa digunakan dalam konteks kalimat “*folk dance performace*” atau “pertunjukan tari-tarian rakyat”
- c. Adalah “pelaksanaan tugas” misalnya dalam kata “*in performng his/her duties*”

Bernadin dan Russell (1993:378) dalam Ruky (2002:15) memberikan batasan mengenai performansi sebagai: “*.the record of outcomes produced on specified job function or actyvity during a specified time period...*” dalam definisi ini aspek yang di tekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan outcomes yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan widodo (2008: 78) menyebutkan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi. Dari definisi tersebut kinerja dalam hal ini lebih ditekankan pada hasil atau apa yang keluar (out comes) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi dari aparatur birokrasi pada organisasi (birokrasi pelayanan publik).

2. Penilaian Kinerja.

Menurut Lansbury dalam Vollence (1999:79) menyebutkan bahwa penilain kinerja didefinisikan sebagai :

“The prosess of identifiing, evaluating, and developing the work performance of employess in the organization. So that the organisation goals and objectives are more effectively achieved, while at the same time benefiting employess in termd of

recognition, receiving feed back, catering from work needs and offering career guidance.”

Calder dan Plano dalam Keban (2004: 195) penilaian kinerja adalah “... *an evaluation of an employee’s progress or lack of progress measured in terms of job effectiveness...*”. Batasan ini lebih menekankan evaluasi kemajuan atau kegagalan dari seorang pegawai. Sedangkan Bernadin dan Russel dalam Keban (2004: 195) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai “.... *a way of measuring the contributions of individuals to their organization...*”. Yang ditekankan pada batasan ini adalah cara mengukur kontribusi yang diberikan oleh setiap individu bagi organisasinya. Whittaker dan Simons dalam Tangkilisan (2005:171) menyebutkan bahwa penilaian kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Hal ini selaras dengan definisi penilaian kinerja yang tertuang dalam *Reference Guide, Province of Albert, Canada* dalam Tangkilisan (2005:171) yang menyebutkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai mekanisme dalam memberikan penghargaan atau hukuman (*reward/punishment*), akan tetapi penilaian kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Penilaian terhadap kinerja bagi setiap organisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat penyimpangan dari pekerjaan atau apakah pekerjaan sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.

Hal ini selaras dengan pendapat Dwiyanto (2002:45) penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikaan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi maka upaya untuk memperbaiki kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja penting untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja maka *benchmarking* dengan mudah bisa

dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan. Selain itu menurut Sedarmayanti (2009:195) arti penting penilaian kinerja organisasi antara lain dapat digunakan untuk :

- a. Memastikan pemahaman pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk mencapai kinerja.
- b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- d. Memberi penghargaan dan hukuman yang obyektif atas kinerja pelaksana yang telah diukur sesuai sistem pengukuran yang telah disepakati.
- e. Menjadi alat komunikasi antara karyawan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah tercapai.
- g. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- h. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

Selain itu, Bastian dalam Tangkilisan (2005:173) berpendapat bahwa penilaian kinerja dalam organisasi akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus (berkesinambungan). Secara terperinci peran penilai kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk mencapai prestasi.
- b. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya.
- d. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- e. Membantu proses kegiatan organisasi .
- f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara obyektif.
- g. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Namun, penilaian kinerja birokrasi publik masih sangat amat jarang dilakukan. Berbeda dengan organisasi bisnis yang kinerja mudah dilihat dari profitabilitas, yang diantaranya tercermin dari indeks harga saham, sedangkan pada birokrasi publik tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan tidak mudah diperoleh informasinya oleh publik. Terbatasnya informasi mengenai kinerja birokrasi pelayanan publik terjadi karena kinerja belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting bagi pemerintah. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3) yang sebenarnya digunakan untuk menilai kinerja pejabat birokrasi sangat jauh relevansinya dengan indikator-indikator kinerja yang sebenarnya. Faktor lain yang menyebabkan terbatasnya informasi mengenai kinerja organisasi publik adalah kompleksitas indikator kerjanya. Berbeda dengan organisasi swasta yang indikatornya relatif sederhana dan tersedia di pasar, indikator

birokrasi sering sangat kompleks. Penilaian birokrasi publik tidak hanya cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti, kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas.

Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi dari organisasi publik yang bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Pada kenyataannya bahwa birokrasi publik memiliki *stakeholders* yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu dengan lainnya sehingga membuat birokrasi publik merumuskan misinya dengan jelas. Hal ini berakibat pada ukuran kinerja organisasi publik di mata *stakeholders* juga berbeda. (Dwiyanto, 2002:46)

3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan organisasi. Indikator kinerja diartikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja dapat di jadikan patokan (standar) menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. (Widodo, 2008:91)

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:198) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi /unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa adanya indikator kinerja sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan/ketidak berhasilan) kebijakan/program/kegiatan, dan pada akhirnya kinerja organisasi/unit kerja pelaksanaannya. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan kegiatan dilaksanakan.
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerja.
- c. Membangun dasar pengukuran, analisis, dan kinerja organisasi atau unit kerja.

Selanjutnya Sedarmayanti (2009:198) juga menyebutkan ada berbagai syarat indikator kinerja yaitu :

- a. Spesifik dan jelas, sehingga dapat di pahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
- b. Dapat diukur secara obyektif, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu : dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
- c. Relevan, harus memiliki aspek obyektif yang relevan.

- d. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan *input*, *output*, hasil, manfaat dan dampak serta proses.
- e. Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

Menurut Dwiyanto (1995) dalam Dwiyanto (2002:48) ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu :

1. Produktivitas.

Konsep produktivitas tidak hanya menyangkut pada tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya di pahami sebagai rasio antara *input* dan *ouput*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diterapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas layanan.

Isu kualitas pelayanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan organisasi pelayanan publik. Banyak orang berpandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan terhadap masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibatnya akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah digunakan. Kepuasan masyarakat dapat menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Responsibilitas.

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau

sesuai dengan kebijakan organisasi baik secara implisit maupun eksplisit.

5. Akuntabilitas.

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya, adalah bahwa para pejabat politik tersebut di pilih oleh rakyat, maka akan mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak dari masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya Kumorotomo dalam Dwiyanto (2002:50) mengungkapkan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi publik, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang relevan.

2. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

3. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

4. Daya tanggap

Berlainan dengan bisnis yang diadakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Menurut Widodo (91:2008) terdapat lima indikator kinerja yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Indikator masukan merupakan suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator keluaran merupakan segala sesuatu berupa produk sebagai hasil langsung pelaksanaan langsung suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator hasil merupakan suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Merupakan seberapa jauh setiap produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator manfaat merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa fasilitas yang dapat di akses oleh publik. Indikator dampak merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lain yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Ratminto (2005:174) menjelaskan bahwa indikator kinerja sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penelitian yang dilakukan dalam proses penemuan dan penggunaan indikator tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mc Donald dan Lawton dalam Ratminto (2005:174) menyebutkan beberapa indikator kinerja yaitu meliputi *output oriented measures*, *throughput*, *efficiency*, *effectiveness*.
 - i. *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.
 - ii. *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang, maupun misi organisasi.
2. Salim & Woodward dalam Ratminto (2005:174) menyebutkan beberapa indikator kinerja yaitu meliputi *economy*, *efficiency*, *effectiveness*, *equality*.
 - i. *Economy* atau ekonomis adalah penggunaan sumberdaya yang sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
 - ii. *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.
 - iii. *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang, maupun misi organisasi.

- iv. *Equality* atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan.
3. Levinne dalam Ratminto (2005:175) menyebutkan beberapa indikator kinerja yaitu meliputi *responsiveness*, *responsibility*, *accountability*.
- i. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan pengguna layanan.
 - ii. *Responsibility* atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
 - iii. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
4. Zeithamal, Pasuraman, & Barry dalam Ratminto (2005:175) menyebutkan beberapa indikator kinerja yaitu meliputi *tangibles*, *responsibility*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*.
- i. *Tangibles* atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki providers.
 - ii. *Reresponsibility* atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
 - iii. *Responsiveness* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
 - iv. *Aassurance* atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers.
 - v. *Eempathy* adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada customers.

4. Kriteria Kinerja

Gomes (1997:137-142) membagi kriteria performansi menjadi beberapa tipe kriteria performansi, yaitu :

- a. Penilaian performansi berdasarkan hasil (*result based performance appraisal evaluation*) yaitu merumuskan performansi berdasarkan pencapaian tujuan organisasi atau hasil akhir.
- b. Penilaian performansi berdasarkan perilaku (*behaviour based performance appraisal evaluation*) yaitu mengukur sarana atau means pencapaian sasaran (*goals*) dan bukannya hasil akhir (*end result*).
- c. Penilaian performansi berdasarkan judgment (*judgment based performance appraisal evaluation*) yaitu menilai performansi berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik yang mencakup :
 - (1) *quantity of work* yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
 - (2) *quality of work* yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
 - (3) *job knowledge* yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.
 - (4) *cooperation* yaitu kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain (sesama anggota organisasi).
 - (5) *dependability* yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja.
 - (6) *Initiative* yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya.
 - (7) *personal qualities* yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah –tamahan, dan itegritas pribadi.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja.

Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Namun, hasil pekerjaan itu juga menunjukkan kinerja. Yuwono dalam Tangkilisan (2005: 180) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan dalam mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif.

Menurut Wibowo (2007:67) terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar suatu organisasi mempunyai kinerja yang baik, yaitu pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai dalam organisasi, manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, konteks organisasi, desain kerja, fungsionalisasi, budaya organisasi, kerja sama.

Ruky dalam Tangkilisan (2005: 180) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi yaitu sebagai berikut :

- a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan

oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka semakin tinggi kinerja organisasi tersebut.

- b. Kualitas input atau material yang digunakan dalam organisasi.
- c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan.
- d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
- e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
- f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2007: 74) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :

- a. Personal factors, yaitu ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen, individu.
- b. Leadership factors, yaitu ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan dan dukungan yang dilakukan oleh pemimpin.
- c. Team factors, yaitu ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang di berikan oleh rekan kerja.
- d. System factors, yaitu ditunjukkan oleh adanya sisten kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
- e. Contextual atau sitiasional factors, yaitu ditunjukkan oleh tingginya tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Selanjutnya Soesilo dalam Tangkilisan (2005: 180) mengemukakan bahwa kinerja organisasi birokrasi di masa depan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.
- c. Sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas karyawan untuk berkerja dan berkarya secara optimal.
- d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan *data base* untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Atmosuprpto dalam Tangkilisan (2005:181) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti berikut :

- a. Faktor eksternal yang terdiri dari :
 - (1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada

keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.

- (2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar.
 - (3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
- b. Faktor eksternal terdiri dari :
- (1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh organisasi.
 - (2) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
 - (3) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
 - (4) Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

2. Pemberantasan Buta Aksara.

Pemberantasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan memberantas. Pemberantasan yang dimaksud di sini adalah pemberantasan buta aksara. Buta aksara secara umum dapat didefinisikan sebagai penduduk yang sama sekali tidak dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan sistem aksara apapun juga. Sehingga pemberantasan buta aksara dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang memberantas buta aksara sehingga masyarakat dapat melek aksara. Seseorang yang melek aksara adalah orang yang dapat memahami membaca dan menulis sebuah pernyataan sederhana tentang kehidupannya setiap hari, melek aksara juga dapat ditafsirkan sebagai melek aksara latin dan angka, melek bahasa Indonesia dan pengetahuan dasar.

Pemberantasan buta aksara merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai mana tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemberantasan buta aksara merupakan salah satu prioritas kebijakan pemerintah dalam pendidikan yang ditandai dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2006 tentang gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan buta aksara adalah dengan program keaksaraan fungsional. Keaksaraan fungsional sendiri terdiri dari dua konsep yaitu keaksaraan yang secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis, dalam pengertian yang lebih luas keaksaraan diartikan sebagai suatu pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh semua warga negara dan salah satu fondasi bagi penguasaan kecakapan-kecakapan hidup lain. Sedangkan istilah fungsional dalam keaksaraan, berkaitan erat dengan fungsi dan atau tujuan dilakukannya pembelajaran di dalam program pendidikan keaksaraan, serta adanya jaminan bahwa hasil dari pembelajaran tersebut benar-benar bermanfaat, bermakna, dan berfungsi atau fungsional bagi peningkatan mutu dan taraf hidup warga belajar dan masyarakatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keaksaraan fungsional adalah suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar warga belajar. (Basuki, 2006:1)

Program keaksaraan fungsional dimaksudkan sebagai kegiatan untuk memberikan kesempatan belajar kepada warga masyarakat yang tidak bersekolah, belum bekerja, dan berasal dari keluarga tidak mampu, melalui program ini diharapkan warga belajar berkesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendapat pekerjaan yang layak atau usaha yang mandiri. Program keaksaraan fungsional merupakan bentuk pelayanan Pendidikan Luar Sekolah untuk membelajarkan warga masyarakat yang buta aksara agar memiliki kemampuan untuk menulis, membaca dan berhitung (calistung). Program keaksaraan ini juga memberikan bekal berbagai macam keterampilan kepada para warga belajar yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekitar. Komponen-komponen yang tercakup dalam dalam program keaksaraan fungsional meliputi :

- a. Tutor, dengan ketentuan :
 - 1) Berpendidikan minimal SMA.
 - 2) Telah mengikuti pelatihan Tutor.
 - 3) Berasal dari daerah setempat.
 - 4) Mampu mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar wajib belajar, dengan menguasai materi yang akan dibelajarkan.
 - 5) Mampu mengembangkan metode pembelajaran partipatif, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan kewajibannya sebagai tutor.
- b. Warga belajar, dengan ketentuan :
 - 1) Warga masyarakat buta aksara.
 - 2) Perempuan atau laki-laki.
 - 3) Miskin atau marginal.

- 4) Prioritas usia 15-44 tahun.
 - 5) Putus sekolah dasar kelas 1-3.
- c. Penyelenggara atau pengelola, yaitu dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar (PKBM), individu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Memiliki data dasar buta aksara.
 - 2) Memiliki tutor sesuai persyaratan.
 - 3) Mampu mengelola, melaksanakan program dan mengadministrasikannya.
 - 4) Mampu mengusahakan dan menyediakan sarana prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan program keaksaraan fungsional.
- d. Kelompok belajar, dapat dibentuk dimana saja dengan prioritas utama pada daerah-daerah yang memiliki angka buta huruf tinggi, dengan ketentuan:
- 1) Setiap kelompok terdiri dari 10-15 warga belajar.
 - 2) Dibimbing oleh seorang tutor yang sudah terlatih.
 - 3) Waktu pertemuan di kelompok belajar minimal 2-3 kali seminggu dengan waktu setiap pertemuan 90 menit.
 - 4) Tersedia tempat belajar, dan tersedia bahan-bahan belajar yang relevan dengan kebutuhan dan minat, serta masalah yang dihadapi warga belajar.
- e. Tenaga Support system, yaitu dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar (PKBM), individu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Memahami seluk-beluk program Keaksaraan fungsional.
 - 2) Mampu membina kelompok belajar.
 - 3) Mampu memberi solusi yang dihadapi kelompok belajar.
 - 4) Mampu mengusahakan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan program keaksaraan fungsional.
 - 5) Mampu memfasilitasi jaringan kemitraan.
- f. Tempat dan waktu dengan ketentuan, program keaksaraan fungsional dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan ketentuan :
- 1) Tempat :
 - i. Mudah dijangkau oleh wajib belajar dan nyaman.
 - ii. Sebaiknya di PKBM, rumah, tempat ibadah atau saung.
 - iii. Tersedia sarana untuk belajar
 - 2) Waktu :
 - i. Minimal 2-3 kali seminggu dengan lama setiap pertemuan 90 menit.
 - ii. Memperhatikan waktu luang warga belajar.
 - iii. Berdasarkan atas kesepakatan warga belajar.

3. Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara.

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar. Sebagai bagian dari organisasi publik Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik.

Persoalan mengenai kinerja organisasi publik sangatlah kompleks, karena ada berbagai faktor yang akan mempengaruhi kinerja organisasi publik. Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo sebagai salah satu organisasi publik yang terdekat dengan masyarakat harus mampu memposisikan dirinya sebagai abdi masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Salah satu pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo adalah pemberantasan buta aksara di wilayah kerjanya. Persoalan buta aksara merupakan persoalan yang mendasar untuk menentukan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Instruktur Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2006 tentang gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan buta aksara adalah dengan program keaksaraan fungsional.

Keaksaraan fungsional merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah atau non formal dan informal yang merupakan salah satu bidang kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nonformal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam upaya mencerdaskan masyarakat. Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dapat diidentifikasi dengan berbagai indikator kinerja organisasi publik.

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara di fokuskan pada indikator produktifitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini indikator kualitas pelayanan dinilai kurang relevan untuk digunakan sebagai indikator kinerja Unit Pelaksana Teknis

Pendidikan Nonformal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara karena dalam hal ini pihak Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nonformal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, seperti pada pelayanan untuk perizinan atau non perizinan. Sedangkan indikator responsibilitas sudah tercakup dalam indikator akuntabilitas.

1. Produktifitas.

Produktivitas pada umumnya di pahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Menurut Dwiyanto (1995) dalam Dwiyanto (2002:48) konsep produktifitas tidak hanya menyangkut pada tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Selain itu, juga harus memperhitungkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diterapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai konsep produktivitas maka dalam penelitian ini akan menekankan konsep produktivitas pada sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara. Hal ini dapat diketahui dengan berbagai program apa saja yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo yang telah dilakukan dalam upaya pemberantasan buta aksara di wilayah kerjanya dan apakah hasilnya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Responsivitas.

Konsep responsivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja organisasi publik. Responsivitas merupakan merupakan daya tanggap dari suatu organisasi terhadap suatu permasalahan. Konsep responsivitas menurut Dwiyanto (1995) dalam Dwiyanto (2002:48) adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam salah satu jurnal internasional yang ditulis Eran Vigoda (2000) menyebutkan bahwa *a responsive politician or bureaucrat must be reactive, sympathetic, sensitive, and capable of feeling the public's needs and opinions*. Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa responsivitas politisi atau birokrat haruslah reaktif, simpatik, sensitif, dan dapat merasakan opini dan kepentingan publik.

Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi publik harus memiliki responsivitas yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Organisasi publik hendaknya memahami apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Selain itu organisasi publik juga harus peka terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan berusaha untuk mencari solusinya sehingga dengan demikian dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan peka (*responsive*) agar dapat memberikan solusi permasalahan yang ada dengan tepat sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu organisasi publik Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo harus memiliki responsivitas yang tinggi agar kinerja baik. Responsivitas pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara dapat diketahui dengan sejauh mana organisasi tersebut merespon, mengatasi, menjawab dan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam permasalahan buta aksara di wilayah kerjanya.

3. Akuntabilitas.

Akuntabilitas telah mengalami perluasan makna dimana dahulu akuntabilitas diidentikan dengan pertanggungjawaban finansial saja akan tetapi pada saat ini akuntabilitas juga memiliki fungsi untuk mengetahui efektifitas dari kinerja organisasi pemerintah terhadap suatu program yang dilaksanakannya. Dalam konteks organisasi publik, akuntabilitas merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang direncanakan dan akan dilakukan oleh organisasi publik.

Menurut Kumorotomo (2005:3) akuntabilitas diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Sejalan dengan pendapat tersebut Dwiyanto (2002:55) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau dimiliki oleh para *stakeholders*. Nilai dan norma yang berkembang dalam pelayanan masyarakat tersebut diantaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan

orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

Dalam penelitian ini, akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara ditekankan pada sejauh mana kebijakan atau program-program yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara tersebut konsisten dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran.

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo sebagai salah satu organisasi publik bagi pengembangan kualitas hidup manusia khususnya yang menyangkut pendidikan usia dini, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan sekolah dasar harus selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dapat tercapai tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan pemberantasan buta aksara. Pemberantasan buta aksara merupakan langkah awal untuk membuka wawasan masyarakat Indonesia untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penanganan yang serius dari Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam upaya pemberantasan buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo. Penanganan yang serius ini dibuktikan dengan kinerja yang maksimal dari UPT tersebut. Dalam penelitian ini membahas Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja UPT tersebut dalam pemberantasan buta aksara yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Indikator kualitas pelayanan dinilai kurang relevan untuk digunakan sebagai indikator kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nonformal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara karena dalam hal ini pihak Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nonformal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, seperti pada pelayanan untuk perizinan atau non perizinan. Sedangkan indikator responsibilitas sudah tercakup dalam indikator akuntabilitas

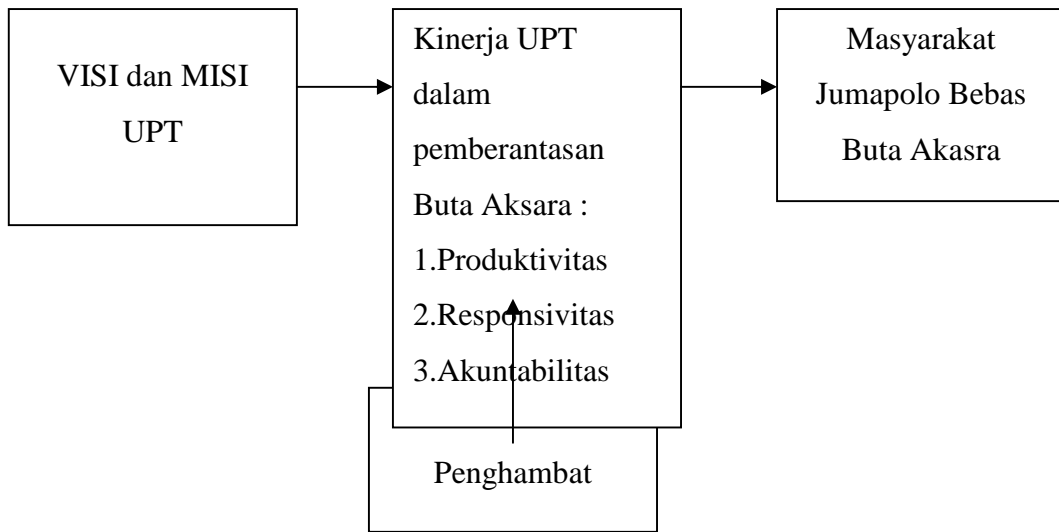
Indikator produktivitas maka dalam penelitian ini akan menekankan konsep produktivitas pada sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan

buta aksara. Hal ini dapat diketahui dengan berbagai program apa saja yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo yang telah dilakukan untuk dalam upaya pemberantasan buta aksara di wilayah kerjanya dan apakah hasilnya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Responsivitas Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara dapat diketahui dengan sejauh mana organisasi tersebut merespon, mengatasi, menjawab dan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam permasalahan buta aksara di wilayah kerjanya. Akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara ditekankan pada akuntabilitas eksternal yaitu sejauh mana kebijakan atau program-program yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara tersebut konsisten dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat.

Dari indikator-indikator tersebut, maka akan diperoleh gambaran mengenai bagaimanakah kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara di wilayah kerjanya serta akan diuraikan juga hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara. Adapun alur kerangka pemikiran yang digunakan dapat dilihat pada bagan I.1 sebagai berikut :

Bagan I.1
Kerangka Pemikiran
Kinerja PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara
di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar



G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Jumapolo yang beralamatkan di Jln. Raya Jumapolo-Karanganyar, Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar dengan berbagai pertimbangan antara lain :

- a. UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar merupakan unsur birokrasi pemerintahan daerah yang salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan publik pada masyarakat, termasuk dalam pemberantasan buta aksara.
- b. Jumlah penderita buta aksara di Kecamatan Jumapolo cukup signifikan yaitu mencapai 2.273 jiwa.
- c. Adanya pelaksanaan program pemberantasan Buta aksara UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo.
- d. Tersedianya data pendukung yang diperlukan dan adanya kemudahan dalam pengumpulan data untuk penelitian.

2. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan keadaan atau fenomena sosial tertentu dimana penelitian yang dilakukan terbatas pada usaha

untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagai mana adanya sehingga hanya bersifat untuk mengungkap fakta yang ada. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan berupa angka-angka sehingga semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi bahan untuk penelitian. (H.B Sutopo 2002: 10)

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang kinerja UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam pemberantasan buta aksara.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yaitu responden yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian. Untuk mendapatkan data primer maka penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti Data statistik jumlah penduduk kecamatan Jumapolo, Data statistik luas wilayah Kecamatan Jumapolo, Data statistik jumlah penderita buta aksara Kecamatan Jumapolo, Data monografi Kecamatan Jumapolo, Laporan tahunan program pendidikan Luar Sekolah UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo, dokumen pelaksanaan kegiatan pemberantasan buta aksara kecamatan Jumapolo, buku-buku referensi dan modul pembelajaran yang berkaitan dengan pemberantasan buta aksara, dan sumber-sumber lainnya. Untuk mendapatkan data sekunder maka digunakan teknik dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para informan yang telah ditentukan. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan memberikan kerangka atau garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan untuk mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. (Moleong, 135 : 2001)

Wawancara dilaksanakan secara *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel pada orang-orang yang benar-benar mengerti tentang sumber permasalahan yang akan diteliti yang disebut dengan *key informant*. Yang termasuk dalam *key informant* dalam penelitian ini adalah kepala UPT, Penilik Luar Sekolah, Tenaga

Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat), tutor keaksaraan fungsional, penyelenggara keaksaraan fungsional, warga belajar keaksaraan fungsional, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pemberantasan buta aksara.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan kenyataan. Dalam penelitian ini, observasi difokuskan pada kinerja UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo, Karanganyar.

c. Telaah data

Telaah data dilakukan dengan mencari dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kinerja UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam pengetasan buta aksara. Dokumen tersebut bisa berupa buku peraturan, laporan-laporan yang dibuat UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, atau surat-surat yang relevan dengan penelitian ini.

5. Validitas Data

Untuk mengkaji keabsahan data yang diperoleh, maka perlu dilakukan Triangulasi Data, yaitu teknik pengecekan data dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data lainnya seb

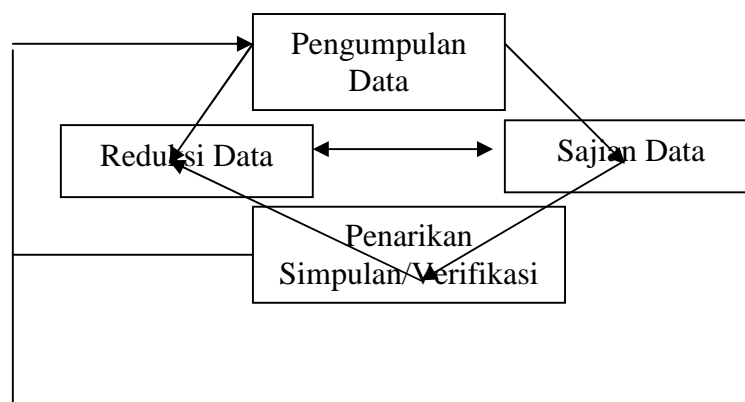
agai pembanding terhadap data yang diperoleh sehingga data yang ada mempunyai tingkat kebenaran yang tinggi. Teknis triangulasi ini memanfaatkan jenis sumber data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda yaitu dengan menggunakan beberapa informasi yang berbeda, yaitu melalui wawancara, observasi dan penggunaan dokumen atau arsip sehingga data yang sejenis bisa teruji kemantapan dan kebenarannya. Teknik Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat keabsahan satu informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

6. Teknik Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dimana model ini mempunyai 3 komponen analisis, yaitu : reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasi yang berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Dalam proses analisis terdapat 3 komponen yang saling terkait serta menentukan hasil akhir analisis, 3 komponen tersebut adalah :

- a. Reduksi data
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.
- b. Sajian data
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi deskriptif dalam bentuk narasi, kalimat, matriks, gambar atau skema, tabel maupun grafik yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami yang mempermudah melakukan penarikan kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami arti dari berbagai data yang diperoleh. Simpulan akhir baru akan diperoleh setelah proses pengumpulan data berakhir. Agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, setelah penarikan simpulan pada verifikasi. Pada dasarnya makna data perlu diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya (H.B Sutopo, 2002: 93). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaktif yaitu : reduksi data, sajian data serta penarikan simpulan dan verifikasi berjalan bersama pada waktu kegiatan pengumpulan data sebagai suatu siklus yang berlangsung sampai akhir penelitian.

Bagan I. 2
Model Analisis Interaktif (HB. Sutopo,2002:96)



BAB II
DISKRIPSI LOKASI

A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI DAN SD) Kecamatan Jumapolo.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI DAN SD) Kecamatan Jumapolo terletak pada pusat kecamatan Jumapolo yang beralamatkan di Jln. Raya Jumapolo-Karanganyar Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah kecamatan jumapolo.

Kecamatan Jumapolo merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Jarak Kecamatan Jumapolo dari pusat pemerintahan Kabupaten Karanganyar yaitu 18 km kearah tenggara. Luas wilayah kecamatan Jumapolo adalah 5.567,021. Secara administratif Kecamatan Jumapolo terdiri dari 12 desa, 103 dusun, 137 dukuh, 122 RW, 307 RT yaitu :

Tabel. II. 1

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Jumapolo

No.	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paseban	375,568	3.549
2.	Lemahbang	409,530	3.734
3.	Karangbangun	346,294	3.570
4.	Ploso	378,718	3.307
5.	Giriwondo	397,654	3.306
6.	Kadipiro	417,790	4.172
7.	Jumantoro	579,480	4.301
8.	Kedawung	480,166	3.399
9.	Bakalan	531,142	3.541
10.	Jumapolo	640,120	5.420
11.	Kwangsan	518,327	5.250
12.	Jatirejo	528,232	4.919
	Jumlah	5.567,021	48.468

Sumber : Data Monografi Kecamatan Jumapolo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo cukup luas. Secara geografis wilayah kecamatan Jumapolo adalah daerah yang berbukit-bukit karena berada di daerah lereng gunung Lawu dengan rata-rata ketinggian 470 m diatas permukaan laut dengan jarak desa dengan pusat kecamatan yang menyebar di seluruh wilayah Kecamatan Jumapolo. Berikut ini merupakan tabel ketinggian rata-rata dan jarak desa dari pusat kecamatan :

Tabel. II. 2

Ketinggian rata-rata dan jarak desa dari pusat kecamatan.

No.	Desa	Ketinggian Rata-rata (m)	Jarak Desa dari Pusat Kecamatan (km)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paseban	340	13
2.	Lemahbang	350	6
3.	Karangbangun	380	3
4.	Ploso	400	3
5.	Giriwondo	580	4
6.	Kadipiro	550	8
7.	Jumantoro	509	6,5
8.	Kedawung	555	5
9.	Bakalan	511	3,5
10.	Jumapolo	400	0
11.	Kwangsan	376	4
12.	Jatirejo	574	4

Sumber : Data Monografi Kecamatan Jumapolo

B. VISI dan MISI

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai sebuah organisasi publik terutama yang menanganai bidang pendidikan, maka Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

Mewujudkan aparat birokrasi di bidang pendidikan pemuda dan Olahraga yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera serta beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat mandiri, memiliki etos kerja, disiplin, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berkesadaran hukum dan lingkungan, serta cinta tanah air.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas guna mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, bertanggung jawab, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan budaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
3. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan.
5. Melaksanakan tugas dan fungsi secara prima, serta berorientasi kepada kepuasan masyarakat.
6. Melakukan deregulasi dan debirokratisasi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas serta perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat dengan fokus Wajar Dikdas 9 Tahun.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT.
2. Sub Bagian UPT, membawahkan :
 - a. Bagian Keuangan.
 - b. Bagian Kepegawaian.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Bagian Pengurus Barang.
 - e. Bagian Pembantu Umum.
3. Pengawas TK/SD.
4. Penilik Luar Sekolah (PLS), membawahkan :
 - a. Tenaga Teknis Dinas (TTD)
 - b. Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat)

5. Sekolah Menengah Atas.
6. Sekolah Menengah Pertama.
7. Sekolah Dasar.
8. Taman Kanak-Kanak.

Bagan II. 1

**Bagan Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini
Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD)**

Kecamatan Jumapolo Tahun 2009

D. Tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo.

1. Kepala UPT PUD NFI DAN SD Kecamatan Jumapolo.

a. Tugas Pokok :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja tahunan penanganan pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB.
- 2) Menyusun rencana dan program kerja tahunan mengenai Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga.
- 3) Memberi petunjuk dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan Non Formal, Pembinaan pemuda dan Olahraga.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, Non Formal, Pemuda dan Olahraga dengan instansi/dinas/jawatan terkait.
- 5) Melaksanakan fungsi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian baik yang berada di sekolah TK/TKLB, SD/SDLB dan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo.

b. Fungsi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan tahunan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo.
- 2) UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan yang meliputi pelaksanaan teknis dan administratif di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
- 3) Menyusun rencana ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan persuratan.
- 4) Menyusun rencana ujian, ulangan umum dan pembagian raport sekolah TK/TKLB, SD/SDLB
- 5) Menyusun kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan non formal kepada masyarakat dalam penuntasan wajar dan pemberantasan buta aksara.

c. Uraian Tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo sebagai pedoman pelaksanaan.
- 2) Membagi tugas kepada Ka.Sub Bagian UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan, Pengawas, Penilik, sesuai dengan bidangnya.
- 3) Memberi petunjuk kepada Ka. Sub Bagian UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan, Pengawas, Penilik, sesuai dengan bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Menilai prestasi kerja kepada Ka. Sub Bagian UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan, Pengawas, Penilik, di lingkungan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo sebagai bahan pengembangan karier.
- 5) Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data TK/TKLB, SD/SDLB, Wajib belajar Dikdas.
- 6) Menyusun rencana pembinaan TK/TKLB, SD/SDLB, Wajar Dikdas, Pendidikan masyarakat, Pembinaan generasi Muda, Keolahragaan.
- 7) Menyusun rencana anggaran kebutuhan pegawai, perlengkapan, sarana prasarana di lingkungan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo
- 8) Memantau kegiatan pelaksanaan kegiatan TK/TKLB, SD/SDLB, Wajar Dikdas, pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda, Keolahragaan.
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan TK/TKLB, SD/SDLB, Wajar Dikdas, pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda, Keolahragaan.
- 10) Memberi layanan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga kepada sekolah dan pendidikan luar sekolah.
- 11) Menyusun laporan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo sesuai hasil yang telah dicapai sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala sub bagian UPT PUD NFI DAN SD Kecamatan Jumapolo.

a. Tugas Pokok :

- 1) Memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi/persekolahan dalam lingkungan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana bidang ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
- 2) Menyusun dan merencanakan pendataan pendidikan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo pada satuan organisasi/sekolah.

- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh satuan organisasi/sekolah dalam lingkungan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo.
 - 4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi/sekolah baik dana rutin/gaji pegawai dalam lingkungan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo
 - 5) Pengelolaan perlengkapan/barang inventaris kantor maupun sekolah.
 - 6) Menyusun rencana usulan rehabilitasi dan bantuan-bantuan kantor/sekolah.
- c. Uraian Tugas :
- 1) Menyusun rencana program kerja tahunan ketatausahaan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo;
 - 2) Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidangnya, melaksanakan ketatausahaan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo;
 - 3) Mengkoordinir urusan ketatausahaan dan surat menyurat;
 - 4) Mengkoordinasikan urusan penyusunan rencana program;
 - 5) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan administrasi pertanggungjawaban;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana dan inventaris;
 - 8) Menyusun laporan-laporan kegiatan UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumapolo;
 - 9) Pendataan persekolahan, pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan;
 - 10) Menyusun bahan informasi pelaksanaan dan pembinaan persekolahan, pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan;
 - 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dari atasan.
3. Sub bagian administrasi UPT PUD, NFI DAN SD Kecamatan Jumapolo.
- a. Keuangan.
- 1) Menyusun program kerja tahunan bidang keuangan
 - 2) Mengelola gaji Kepala, Guru dan Penjaga SD
 - 3) Melaksanakan pengolahan keuangan rutin dan uang lainnya
 - 4) Menyusun Kasflow (aliran dana) dan Kas Umum
 - 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan
 - 6) Melayani urusan keuangan lainnya (pinjaman ke bank) dll
 - 7) Melayani tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Kepegawaian.
- 1) Menyusun program kerja tahunan bidang kepegawaian
 - 2) Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) Kepala, Guru dan Penjaga, TK/SD

- 3) Menyusun dan mengusulkan kekurangan kepala, Guru dan penjaga, TK/SD
- 4) Mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala bagi Kepala, Guru dan Penjaga, TK/SD
- 5) Mengusulkan mutasi, rotasi dan penghentian Kepala, Guru dan Penjaga, TK/SD
- 6) Merencanakan dan mengusulkan pelatihan bagi Kepala, Guru dan Penjaga, TK/SD
- 7) Mendata dan mengusulkan kepemilikan Karpeg, Karis/Karsu dan askes bagi Kepala, Guru dan Penjaga, TK/SD dan pegawai administrasi/fungsional.
- 8) Mendata dan menginventarisasi wiyata bhakti maupun karya bhakti bagi guru dan penjaga TK/SD
- 9) Melayani urusan kepegawaian lainnya (cuti, surat jalan, surat tugas, dll)
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Tata Usaha

- 1) Menyusun program kerja tahunan bidang ketatausahaan
- 2) Menyusun RAPB tahunan
- 3) Mengkoordinir urusan surat menyurat
- 4) Menyusun dan mengirim laporan-laporan
- 5) Menyusun dan menginformasikan program/kegiatan sekolah (UUS, UAS, dll)
- 6) Pendataan dan statistik keadaan sekolah TK/SD
- 7) Membuat Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) bagi pegawai administrasi UPT
- 8) Memberikan layanan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas pokok.
- 9) Mengarsipkan dokumen-dokumen penting
- 10) Melaksanakan administrasi umum
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Pengurus Barang

- 1) Menyusun program tahunan bidang sarana dan prasarana
- 2) menghimpun dan memeriksa RAPBS dari sekolah-sekolah
- 3) Mengusulkan rehab gedung kantor UPT maupun sekolah TK, SD
- 4) Mendata dan menginventarisasi aset kantor Cabang maupun Sekolah TK, SD
- 5) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang-barang aset Kantor UPT maupun Sekolah
- 6) Mengusulkan mendistribusikan dropping alat-alat peraga dan buku paket ke sekolah.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- e. Pembantu Umum.
 - 1) Membantu kegiatan umum di bidang-bidang lain yang membutuhkan
 - 2) Melaksanakan 5 K bagi kantor UPT PUD, NFI dan SD
 - 3) Melayani konsumsi dan akomodasi bagi pegawai UPT PUD, NFI dan SD
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 4. Pengawas TK dan SD.
Bidang ini secara umum tugas pokok melakukan pengawasan TK dan SD di tingkat kecamatan.
- 5. Penilik Luar sekolah (PLS).
Bidang ini memiliki tugas pokok :
 - 1) Melaksanakan pendidikan keaksaraan fungsional dalam pemberantasan buta aksara.
 - 2) Melaksanakan pendidikan kejar paket A, Kejar paket B, serta Kejar paket C.
 - 3) Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini seperti perintisan dan kelembagaan serta pelatihan dan bimbingan terhadap guru play group.
 - 4) Menangani masalah kepemudaan, seperti melakukan tindakan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba, pembinaan kepramukaan, dan melaksanakan lomba TUB dan PBB di tingkat kecamatan.
 - 5) Menyelenggarakan kegiatan kepemudaan dan seni.

E. Sumber Daya Manusia Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek yang mempunyai peran penting dalam perkembangan suatu organisasi, karena hal ini merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan yang menentukan arah dan keberlangsungan organisasi tersebut. Sebagai suatu organisasi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo tentunya memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan usia dini non formal informal dan sekolah dasar di Kecamatan Jumapolo.

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal dengan pelaksanaan setiap tugas dan fungsi secara efektif, maka Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Aspek kualitas yang memadai

bermaksud agar penyelenggaraan pelayanan yang ada dapat berjalan dengan baik dan bermutu. Sedangkan aspek kuantitas yang memadai bermaksud agar pelayanan yang ada dapat seluruh masyarakat Kecamatan Jumapolo dalam menciptakan pendidikan yang merata.

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo memiliki wilayah kerja yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini mengidentifikasi bahwa Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Berikut merupakan tabel komposisi pegawai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo berdasarkan jabatan :

Tabel II. 3

Komposisi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo Berdasarkan Jabatan Tahun 2009

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala UPT	1	5,26
2.	Kepala Sub Bagian TU	1	5,26
3.	Pengawas TK/SD	6	31,57
4.	Penilik Pendidikan Luar Sekolah	2	10,52
5.	Tenaga Teknis Dinas	1	5,26
6.	Tenaga Teknis Lapangan	1	5,26
7.	Staf	7	36,84
	Jumlah	19	100

Sumber : UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo

Berdasarkan tabel diatas, secara umum formasi yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo telah terisi sehingga diharapkan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Selain jabatan latar belakang pendidikan juga merupakan faktor yang penting untuk mencapai kinerja yang optimal pada suatu organisasi. Semakin tinggi jenjang pendidikan pegawai akan berpengaruh pada kemampuan atau pengetahuan dari para pegawai tersebut sehingga dapat terbentuk pola pikir

yang lebih sistematis dan terencana serta lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman yang dapat mendukung kemajuan organisasi tersebut. Berikut dapat dilihat komposisi pegawai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel. II. 4

Komposisi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekolah Dasar	-	-
2.	Sekolah Menengah Pertama	-	-
3.	Sekolah Menengah Atas	8	42,10
4.	Sarjana Muda	2	10,52
5.	Sarjana	7	36,84
6.	Magister	2	10,52
	Jumlah	19	100

Sumber : UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo telah tamat pendidikan dasar. Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas mayoritas dimiliki oleh para staf pegawai UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo, para pengawas TK dan SD, penilik luar sekolah, telah menempuh pendidikan sarjana sedangkan untuk kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo telah menyelesaikan pendidikan magister. Dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai ini diharapkan seluruh kebijakan yang bisa tepat sasaran, diimplementasikan dengan baik dan bisa mendukung pencapaian visi dan misi yang ada.

F. Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo.

Kegiatan pemberantasan buta aksara merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan oleh upaya pemberantasan buta aksara adalah melalui program pendidikan keaksaraan fungsional. Keaksaraan fungsional adalah salah satu pendidikan luar sekolah yaitubagian dari pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo.

Strategi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI DAN SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara adalah dengan melibatkan semua komponen baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Semua program dari tiap tingkatan tersebut disinkronkan agar bisa terlaksana dengan baik. Untuk tingkatan desa, dilakukan kegiatan sosialisasi, pendataan buta aksara, pembelajaran dan pelaporan. Sedangkan untuk tingkat kecamatan telah dibentuk tim koordinasi pemantauan program yang dilakukan desa.

Prinsip-prinsip yang di terapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam penyelenggaraan program keaksaraan fungsional meliputi yaitu:

1. Konteks Lokal

Program Keaksaraan Fungsional dikembangkan berdasarkan konteks lokal, artinya kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan berdasarkan pada minat dan kebutuhan warga belajar berkaitan dengan potensi yang ada di sekitarnya. Untuk mengetahui konteks lokal tersebut, perlu dilakukan observasi lingkungan keaksaraan. Tutor dan warga belajar perlu mengobservasi lingkungan sekitarnya, guna mencari dan mengumpulkan informasi untuk kegiatan belajarnya. Observasi lingkungan keaksaraan bertujuan untuk mencari potensi, masalah, dan sumber - sumber pemecahannya yang berkaitan dengan situasi dan kondisi warga belajar. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Tutor dan warga belajar mengunjungi masyarakat sekitar.
- b. Mengunjungi dan memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat sekitar.
- c. Mengunjungi instansi, organisasi atau kantor-kantor terkait.
- d. Mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan keliling.
- e. Mengunjungi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- f. Memanfaatkan bahan bacaan yang ada di rumahnya sendiri .

2. Desain Lokal

Keaksaraan Fungsional didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi lingkungan setempat serta pihak - pihak yang terlibat dalam program keaksaraan fungsional perlu membuat desain lokal. Tutor perlu merancang kegiatan belajar mengajarnya, berdasarkan respon atas minat, kebutuhan dan masalah. Dalam hal ini, tutor bersama warga belajar perlu membuat dan menetapkan kurikulum tersendiri yang mudah dan fleksibel berdasarkan kesepakatan bersama. Kurikulum dalam Program Keaksaraan Fungsional adalah semacam rencana belajar yang intinya adalah bagaimana membantu warga

belajar dan tutor mencari dan menulis informasi untuk menyusun, menetapkan dan melaksanakan kegiatan belajar berdasarkan kebutuhan lokal.

Melalui kegiatan ini, pada akhirnya akan menghasilkan rencana belajar yang disepakati oleh warga belajar dan tutor, dan dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Proses kegiatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi antara warga belajar dan tutor untuk menetapkan :

- a. Pokok bahasan yang ingin dipelajari dan prioritas pokok bahasan yang diinginkan.
- b. Cara atau strategi pembelajaran yang akan digunakan.
- c. Langkah - langkah kegiatan yang perlu dilakukan.
- d. Jadwal kegiatan pembelajaran.
- e. Kesepakatan belajar mengajar antara tutor dan warga belajar.

3. Proses Partisipasi

Proses partisipasi, maksudnya adalah bagaimana cara melibatkan warga belajar berpartisipasi secara aktif dalam mengumpulkan, menganalisis, menyimpulkan dan memformulasikan ide atau informasi yang telah dimiliki warga belajar. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh tutor dengan merangsang warga belajar untuk diskusi dengan cara:

- a. Membuat pertanyaan.
- b. Melakukan tanya jawab tentang pengalaman warga belajar.
- c. Menulis cerita atau pengetahuan lokal.
- d. Membuat peta masalah lingkungan.
- e. Membuat tabel tentang kegiatan - kegiatan warga belajar dan sebagainya.

Kesimpulan yang dibuat warga belajar merupakan gambaran dari kebutuhan, keinginan dan minat warga belajar itu sendiri. Oleh karena itu, hasil kegiatan diskusi ini harus dijadikan dasar dalam menyusun rencana belajar. Dalam hal ini, tutor perlu membantu dan membimbing warga belajar dalam berdiskusi.

4. Fungsional

Kriteria utama dalam menentukan keberhasilan program keaksaraan fungsional adalah dengan cara meningkatkan kemampuan dan keterampilan setiap warga belajar dalam memanfaatkan dan mengfungsikan keaksaraan atau hasil belajarnya dalam kegiatan sehari-hari. Dari hasil belajar diharapkan warga belajar dapat

menganalisis dan memecahkan masalah untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Program keaksaraan fungsional terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pemberantasan (keaksaraan dasar), tahap pembinaan (keaksaraan lanjutan atau keaksaraan fungsional), tahap pelestarian (mandiri). Hasil yang ingin dicapai tahap pemberantasan (keaksaraan dasar) adalah warga belajar dapat membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana serta tutor di harapkan dapat membantu warga belajar untuk menghilangkan pikiran dan perasaan tidak mampu. Dalam tahap pembinaan warga belajar diharapkan sudah bisa menulis, membaca, berhitung serta dapat mengembangkan kemampuan fungsionalnya, misalnya dapat mengisi formulir, menulis kwitansi, membaca petunjuk. Dalam pelestarian diharapkan warga belajar dapat menggunakan kemampuan baca, tulis, hitung (calistung) dalam kehidupan sehari-hari, dapat memecahkan masalah dalam hidupnya serta dapat membuka jalan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupannya.

Dalam upaya mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas buta aksara diwilayah Jumapolo, UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo membentuk lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Ngudi Makmur sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat Jumapolo khususnya dalam pendidikan luar sekolah. Tujuan dibentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Makmur sebagai pusat kegiatan belajar di kecamatan Jumapolo adalah agar masyarakat Jumapolo bisa memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan masyarakat jumapolo, agar masyarakat Jumapolo memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya.

BAB III PEMBAHASAN

A. Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam Pemberantasan Buta Aksara.

Kinerja birokrasi organisasi publik telah menjadi daya tarik untuk dicermati dan dikaji pada era reformasi dan otonomi daerah. Hal tersebut tidak hanya dibahas oleh kalangan teoritis dan pemerhati saja, akan tetapi oleh setiap individu pun tertarik untuk memperbincangkannya. Oleh karena itu, kinerja birokrasi publik telah menjadi isu publik (*public issues*) sehingga setiap orang tergerak untuk memikirkan dan mencari solusi atas masalah terhadap kinerja birokrasi publik.

Seiring dengan adanya reformasi disegala bidang, tidak terkecuali reformasi birokrasi muncul adanya tuntutan adanya perbaikan kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat. Perbaikan kinerja organisasi publik merupakan hal penting karena sesuai dengan tugasnya organisasi publik bertugas untuk melayani masyarakat atau kepentingan orang banyak sehingga

usaha perbaikan kinerja organisasi publik harus mendapatkan penanganan yang serius untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbaikan kinerja organisasi publik akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berjalan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan kondusif dan tercipta stabilitas nasional. Sebaliknya apabila tidak ada upaya perbaikan terhadap kinerja birokrasi maka akan muncul krisis kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah yang akan berakibat pada instabilitas nasional.

Salah satu cara untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja organisasi publik adalah dengan penilain kinerja organisasi tersebut. Penilain kinerja terhadap birokrasi publik bertujuan untuk mengetahui sampai manakah organisasi tersebut berhasil mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi publik maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat, sehingga upaya perbaikan bisa dilakukan dengan lebih terarah dan sistematis.

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo merupakan salah satu organisasi publik atau birokrasi pemerintahan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan usia dini, non formal informal dan sekolah dasar. Sebagai sebuah organisasi publik Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo juga wajib melakukan perbaikannya agar pendidikan di wilayah Kecamatan Jumapolo semakin berkualitas.

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara di fokuskan pada indikator produktifitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Indikator kualitas pelayanan dinilai kurang relevan untuk digunakan sebagai indikator kinerja dalam penelitian ini karena Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nonformal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, seperti pada pelayanan untuk perizinan atau non perizinan. Sedangkan indikator responsibilitas sudah tercakup dalam indikator akuntabilitas. Selain itu akan dijelaskan hambatan-hambatan dalam pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo.

A. Produktifitas.

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini konsep produktivitas ditekankan pada sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara dan bagaimana hasil yang dicapai oleh UPT

PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara. Hal ini dapat diketahui dengan berbagai upaya apa saja yang telah dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam upaya pemberantasan buta aksara di wilayah kerjanya dan apakah hasilnya sudah sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, ada berbagai tahapan yang dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara. Secara umum ada tiga tahapan dalam pendidikan keaksaraan fungsional yaitu yaitu tahap persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan keaksaraan fungsional. Pada tahap persiapan hal dilakukan oleh pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo adalah pendataan jumlah penderita buta aksara, sosialisasi program pemberantasan buta aksara, perekrutan warga belajar, tutor, dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional, serta pengajuan proposal pendidikan keaksaraan fungsional. Tahap kedua yaitu pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional. sedangkan pada tahap ketiga yaitu evaluasi pendidikan keaksaraan fungsional. Evaluasi pendidikan keaksaraan fungsional dilaksanakan secara bertahap mulai dari evaluasi harian pada akhir pertemuan, evaluasi tematik, dan evaluasi akhir pendidikan pada saat uji kompetensi. Untuk lebih jelasnya berikut ini penjabarannya :

1. Tahap Persiapan.

- a. Pendataan Jumlah Penderita Buta Aksara.

Hal pertama yang dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara pada tahun 2009 ini adalah menentukan sasaran kerja atau jumlah warga penderita buta aksara yang harus digarap oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo pada tahun 2009. Pendataan sasaran dilakukan dengan mereview kinerja UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo pada tahun 2008 dalam pemberantasan buta aksara. Tujuan dari adanya review kinerja tersebut adalah untuk mengetahui seberapa besar jumlah penderita buta aksara yang sudah digarap dan seberapa besar jumlah penderita buta aksara yang belum tergarap oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo pada tahun 2008. Selain itu, dengan adanya review kinerja tahun terdahulu dapat dijadikan bahan pijakan untuk arahan program pemberantasan buta aksara yang dilaksanakan pada tahun 2009 ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“ Hal pertama yang dilakukan dalam pemberantasan buta aksara pada tahun 2009 ini ya mempelajari atau mereview laporan kerja tahun kemarin. Berapa banyak warga sudah tergarap berapa yang belum?, hasil gimana?, yang belum tergarap diapakan? Yang sudah terus selajutnya bagaimana?. Dari situ kita susun rencana-

recana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ini.”(wawancara tanggal 31 Agustus 2009)

Ibu Titik selaku Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Kecamatan Jumapolo mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan data yang lebih akurat biasanya pada awal tahun dilakukan pendataan ulang jumlah penderita buta huruf di wilayah Kecamatan Jumapolo. Untuk memudahkan proses pendataan di seluruh wilayah Kecamatan Jumapolo maka Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo membentuk Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara yang terdiri dari:

1. Kepala desa setempat sebagai penanggungjawab Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara.
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai ketua Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara.
3. Sekretaris desa sebagai sekretaris Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara.
4. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), ketua karangtaruna, ketua tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala dusun sebagai anggota Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara.

Tujuan dari dibentuknya Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gunawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“.... Karena Kecamatan Jumapolo wilayahnya cukup luas maka untuk memudahkan pendataan jumlah buta aksara di Kecamatan Jumapolo kita buat suatu tim mbak, tim itu kita namakan Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara. Tim tersebut terdiri dari para pemangku kepentingan di desa tersebut, ya terdiri dari kepala desanya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), ketua karangtaruna, ketua tim penggerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh kepala dusun di desa itu mbak. Agar mereka mau berpartisipasi dalam program ini ya kami memberikan pengarahan tentang pentingnya pemberantasan buta aksara, teknis pelaksanaan, pendidikan-pendidikan yang

akan dilaksanakan, sampai mereka betul-betul paham, dengan begitu mereka semua dapat menyampaikan program pemberantasan buta aksara dengan jelas juga kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat mengerti betul pentingnya pemberantasan buta aksara, sehingga warga yang masih menderita buta aksara bisa tergerak untuk mengikuti program ini. selain itu, warga dapat terbuka dengan keadaannya karena tidak semua penderita buta aksara mau jujur dengan keadaan mereka, sehingga diperlukan pendekatan secara psikologis dan dengan hati-hati biar mereka tidak tersinggung mbak. Selain itu, diharapkan data yang diperoleh bisa seperti fakta yang ada di masyarakat.” (wawancara tanggal 5 September 2009)

Dengan dibentuknya Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara memberikan berbagai manfaat terhadap proses pemberantasan buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo seperti yang diungkapkan Ibu Titik selaku Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Kecamatan Jumapolo:

“.... Dengan dibentuknya tidak Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara di desa-desa seluruh wilayah kecamatan Jumapolo ini sangat memudahkan kami untuk bekerja mbak, jadi kami tidak perlu mendata satu persatu warga masyarakat yang ada di Kecamatan Jumapolo, karena yang mendata adalah pak RT, dari pak RT kemudian dikasikan ke pak kadus, terus kemudian disampaikan kepada pegawai desa, dari pegawai desa itulah kemudian kami ambil datanya. Hal ini sangat efisien karena bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Coba kalau kami harus mendata sendiri, bisa-bisa malah tidak selesai-selesai mbak, untuk mendata satu kecamatan saja kami belum tentu mendapatkan data yang akurat, apalagi kalau 12 desa mbak? Selain itu masyarakat disini lebih tertutup kalau kami yang mendata, karena merasa malu, kalau sama pak RTnya tidak malah tidak malu-malu soalnya kan sama tetangga sendiri dan sudah akrab, kalau sama kami kan ada yang belum kenal mbak, jadi data yang didapatkan juga lebih akurat mbak” (wawancara tanggal 8 september 2009)

Hasil pendataan tahun 2009 yang dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo menunjukkan bahwa jumlah penderita buta aksara di Kecamatan Jumapolo masih cukup signifikan yaitu mencapai 2.273 jiwa. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel III. 1 dibawah ini :

Tabel. III.1
 Jumlah Penderita Buta Aksara Berdasar Kelompok Usia
 Kecamatan Jumapolo Tahun 2009

No	Desa	Jumlah Penderita buta aksara berdasarkan Kelompok usia							
		15-24 Tn		25-44 Thn		45-66 Thn		> 67Thn	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Paseban	0	0	2	45	10	75	1	20
2.	Lemahbang	0	0	0	46	5	48	0	3
3.	Karangbangun	0	2	6	65	10	65	0	5
4.	Ploso	0	3	0	42	2	70	0	10
5.	Giriwondo	0	1	5	60	15	67	2	16
6.	Kadipiro	0	0	4	69	16	110	2	12
7.	Jumantoro	0	0	8	120	16	140	4	13
8.	Kedawung	2	0	8	75	20	125	0	6
9.	Jumapolo	0	0	5	68	15	112	9	19
10.	Kwangsan	0	0	2	59	16	98	4	20
11.	Jatirejo	0	0	0	70	9	32	1	8
12.	Bakalan	0	0	5	126	20	98	5	21

	Jumlah	2	6	45	845	154	1.040	28	153
--	--------	---	---	----	-----	-----	-------	----	-----

Sumber : UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penderita buta aksara adalah kaum perempuan hal ini disebabkan karena adanya budaya yang berkembang di masyarakat pada zaman dahulu adalah kaum perempuan tidak perlu sekolah karena nantinya hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Berikut merupakan penuturan dari ibu Martinah umur 42 tahun dari desa kadipiro :

“.... saya ngak bisa baca tulis solanya dulu saya tidak di sekolahkan sama orang tua saya mbak. Selain ngak punya uang buat sekolah, kata orang tua saya buat apa sekolah wong nantinya saya hanya mengurus rumah saja.” (wawancara tanggal 3 Oktober 2009)

Selain itu Ibu Sumini warga Lemahbang juga menuturkan bahwa beliau tidak bisa baca tulis karena dulu putus sekolah karena meningkah muda, berikut penuturannya :

“.... dulu saya sempat sekolah sampai kelas tiga mbak, tapi putus sekolah soalnya saya keburu dinikahkan sama orang tua saya jadinya saya lupa huruf dan ga bisa baca tulis hitung.” (wawancara tanggal 5 Oktober 2009)

b. Sosialisasi Pemberantasan Buta Aksara

Langkah selanjutnya adalah sosialisasi pemberantasan buta aksara pada seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Jumapolo yaitu meliputi pihak pemerintahan Kecamatan Jumapolo, Koramil, perangkat desa di seluruh Kecamatan Jumapolo, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Jumapolo serta warga masyarakat Kecamatan Jumapolo. Sosialisasi program pemberantasan buta aksara ditujukan agar semua pihak dapat mengetahui secara jelas tentang pentingnya tujuan dari program pemberantasan buta aksara serta diharapkan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberantasan buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo. Sehingga pada akhirnya program pemberantasan buta aksara dapat dilaksanakan secara optimal dan Kecamatan Jumapolo bisa tuntas buta aksara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Tarwanto selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo :

“..... Setelah ada data yang jelas mengenai jumlah penderita buta aksara di Kecamatan Jumapolo maka pihak UPT melakukan sosialisasi program pemberantasan buta ke semua stakeholders yang ada di Kecamatan Jumapolo ini

mbak, stakeholders itu ya para pemangku kepentingan ya pihak kecamatan, semua perangkat desa, koramil, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, serta masyarakat Kecamatan Jumapolo. Tujuan dari sosialisasi ini ya untuk memberi tahu pada semua pihak bahwa di Kecamatan Jumapolo ini ada program pemberantasan buta aksara, menjelaskan pentingnya pemberantasan buta aksara, tujuan yang ingin dicapai dalam pemberantasan buta aksara sampai mereka jelas betul sehingga mereka mengerti dan mau berpartisipasi dalam pendidikan buta aksara ini mbak....” (wawancara tanggal 8 september 2009)

Ada berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam menyosialisasikan pendidikan pemberantasan buta aksara misalnya saat rapat koordinasi di kecamatan, saat ada rapat PKK, saat ada penyuluhan didesa, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani selaku penilik pendidikan luar sekolah (PLS) UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo:

“.... sosialisasi tentang pemberantasan buta aksara dapat kami laksanakan secara flaksibel mbak bisa secara formal maupun informal. Yang formal ya saat ada rapat koordinasi di Kecamatan atau pada pendidikan senenan dan kemisan, saat ada rapat ibu-ibu PKK nah kami masuk di sana, kami minta waktu untuk sosialisasi pemberantasan buta aksara . Sedangkan yang informal ya misalnya kalau lagi pas ketemu bu kepala desa atau bu lurah di suatu acara nah di sana saya menyampaikan kalau ada pendidikan pemberantasan buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo ini, atau pada saat pengajian ibu-ibu, nah disana kami juga sekalian menyampaikan tentang program pemberantasan buta aksara, apa yang tujuannya, apa manfaatnya, bagaimana pelaksanaannya, hingga mereka paham mengenai pendidikan pemberantasan buta akasara.” (wawancara tanggal 31 Agustus 2008)

- c. Perekruton penyelenggara, tutor dan warga belajar pendidikan keaksaraan fungsional

Setelah masyarakat mengetahui manfaat dan pentingnya pemberantasan buta aksara, maka langkah selanjutnya yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara adalah menyediakan berbagai komponen yang harus ada dalam

pemberantasan buta aksara. Komponen-komponen yang tercakup dalam pendidikan keaksaraan fungsional meliputi perekrutan calon penyelenggara, tutor dan warga belajar pendidikan keaksaraan fungsional.

Penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional berperan menyelenggarakan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan keaksaraan fungsional yang akan dilaksanakan pada daerah tersebut. Berikut ini penuturan Bapak Gunawan selaku penilik pendidikan luar sekolah (PLS) UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo:

“..... dalam program pemberantasan buta aksara di Kecamatan jumapolo ini kita perlu merekrut penyelenggara keaksaraan fungsional. Penyelenggara keaksaraan fungsional sangat diperlukan untuk mendukung pendidikan KF ini mbak, ya seperti menyediakan calon warga belajarnya, sarana-prasarana yang dibutuhkan, mengadministrasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan KF serta berkoordinasi dengan pihak UPT agar pendidikan ini bisa berjalan dengan lancar dan walaupun ada hambatan bisa segera ditangani.” (wawancara tanggal 5 September 2009)

Penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Pondok Pesantren, Pusat Pendidikan Belajar (PKBM), Individu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki data dasar buta aksara.
- b. Memiliki tutor sesuai persyaratan.
- c. Mampu mengelola, melaksanakan program dan mengadministrasikannya.
- d. Mampu mengusahakan dan menyediakan sarana prasarana yang diperlukan untuk kegiatan keaksaraan fungsional.

Menurut penuturan Ibu Sri Mulyani selaku penilik pendidikan luar sekolah (PLS) UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional di Kecamatan Jumapolo lebih di fokuskan pada aparat pemerintah desa seperti bapak kepala desa, ibu ketua PKK, bapak kepala dusun, bapak RT atau RW. Hal ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo agar warga penderita buta aksara bersedia untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional untuk memberantas buta aksara di Kecamatan Jumapolo. Secara emosional warga penderita buta aksara akan merasa lebih segan apabila yang memerintah untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional adalah aparat dan tokoh di desanya. Untuk lebih jelasnya berikut wawancaranya :

“ Untuk penyelenggara keaksaraan fungsional kami punya strategi khusus mbak, yaitu mengambil dari orang-orang yang masuk dalam pemangku kepentingan di desa tersebut, misalnya pak Kadesnya, ibu ketua PKK, pak Kadusnya, pak RT atau Rwnya. Lha, mengapa seperti itu? Ya itu tadi mereka memiliki kapasitas untuk memerintah warganya yang masih buta aksara untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional ini. Rata-rata domisilinya sudah biasa untuk digunakan pertemuan sehingga memungkinkan untuk pendidikan keaksaraan fungsional ,di sana sudah ada sarana-prasarananya mbak ya meja tulis, kursi, serta papan tulisnya, jadi tidak perlu repot-repot cari lagi. Serta rata-rata mereka adalah orang-orang yang menjadi tokoh didesa itu sehingga lebih disegani masyarakat. Agar mereka mau, ya kita harus melakukan pendekatan terhadap mereka. Pendekatan tentunya dengan mengintensifkan koordinasi, caranya bisa macam-macam mbak, kami bisa datang atau mengundang mereka dalam suatu pertemuan. Setelah terkumpul mereka kita berikan pengertian dasar penyelenggaraan keaksaraan fungsional itu apa?, arahnya bagaimana?, konsekuensinya apa?, terus mungkin sampai imbalan atau ucapan terimakasihnya apa? Atau jerih payahnya apa? itu semua kami sampaikan. Kemudian kami juga menyampaikan teknis penyelenggaraanya, pendanaannya gimana?, koordinasinya bagaimana?, bentuk pertanggungjawabannya gimana? Semua itu kami jelaskan secara gamblang dan jelas sampai mereka paham. Nah, kalau mereka sudah paham diajak kerjasama untuk jadi penyelenggara rata-rata OK semua. Belum ada yang pernah menolak ko mbak...” (wawancara tanggal 31 Agustus 2009)

Hal ini senada dengan penuturan Ibu Sukiyanti selaku penyelenggara keaksaraan fungsional di Desa Jumapolo :

“..... Sebelum jadi penyelenggara, dulu saya diundang oleh pihak UPT untuk diberi pengarahan tentang kegiatan keaksaraan fungsional ini ya samapai jelas mbak apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sampai jelas. Kemudian saya diaturi untuk jadi penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional di desa ini. Lha, kalo tujuannya jelas ya kami setuju-setuju saja mbak, ya itung-itung ikut menyukseskan program pemerintah. Saya juga ikut senang kalo bisa membantu para warga bisa baca tulis hitung. ” (wawancara tanggal 3 Oktober 2009)

Tahap selanjutnya adalah rekrutmen tutor keaksaraan fungsional. Tutor keaksaraan fungsional adalah guru yang mengajar warga belajar dalam pendidikan keaksaraan fungsional. Secara umum persyaratan tutor keaksaraan fungsional adalah :

- a. Berpendidikan minimal SMA.
- b. Telah mengikuti pelatihan Tutor.
- c. Berasal dari daerah setempat.
- d. Mampu mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar wajib belajar, dengan menguasai materi yang akan dibelajarkan.
- e. Mampu mengembangkan metode pembelajaran partipatif, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan kewajibannya sebagai tutor.

Pemilihan tutor pendidikan keaksaraan fungsional harus dilaksanakan secara intensif. Tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional dipilih berdasarkan persyaratan atau kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan prosedur yang ada serta harus benar-benar mengetahui kondisi daerah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titik selaku Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Kecamatan Jumapolo :

“ selain berdasar pada ketentuan yang ada dalam pemilihan tutor dan penyelenggara, juga ada prioritas-prioritas tertentu. Kalo tutor ya mereka yang jadi guru TK atau SD, kalo penyelenggara mereka yang jadi tokoh didesa tersebut misalnya pak kadesnya, bu ketua PKK, pak luranya. Ini kita lakukan agar pelaksanaan pemberantasan buta aksara dapat telaksana dengan baik, jadi ngak asal-asal dalam pemilihan tutor dan penyelenggaranya.” (wawancara tanggal 16 oktober 2009)

Setelah perekrutan penyelenggara dan tutor keaksaraan fungsional maka tahap selanjutnya adalah perekrutan warga belajar keaksaraan fungsional yang merupakan obyek atau sasaran dari adanya program keaksaraan fungsional dalam rangka pemberantasan buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo. Ketentuan seseorang menjadi warga belajar pendidikan keaksaraan fungsional adalah sebagai berikut :

- a. Warga masyarakat buta aksara.
- b. Perempuan atau laki-laki.
- c. Miskin atau marginal.
- d. Prioritas usia 15-44 tahun.
- e. Putus Sekolah Dasar kelas 1-3.

Pendataan calon warga belajar biasanya dilakukan oleh calon penyelenggara dan tutor keaksaraan fungsional serta dibantu oleh Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara. Berikut ini

penuturan Ibu Titik selaku Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Kecamatan Jumapolo :

“..... sasaran dari adanya kegiatan fungsional ini ya masyarakat yang masih buta aksara mbak, tapi diprioritaskan bagi mereka yang masih berumur 14 – 44 tahun, kemudian mereka yang DO kelas 1-3 SD, serta dari keluarga yang kurang mampu. Perekrutan dan pendataan calon warga belajar kami serahkan pada calon penyelenggara dan tutor serta dibantu oleh Tim Koordinasi Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara yang sudah kami bentuk pada setiap desa diseluruh Kecamatan Jumapolo ini mbak. Dengan adanya tim tersebut saya selaku TLD disini merasa sangat terbantu mbak selain memudahkan pendataan juga memudahkan perekrutan warga belajarnya. Kalo kami yang ngajak warga penderita buta aksara untuk ikut pendidikan keaksaraan fungsional, mereka malah tidak mau, tapi kalau yang ngajak bu RT atau bu kadusnya malah mau mbak. Ya mungkin kalo sama tugasnya mereka merasa malu atau kadang pura-pura tidak butuh. Sok, kadang itu warga penderita buta aksara itu didepan kami ngeyel ngakunya sudah bisa baca tulis, padahal ya ngak bisa mbak, kadang saya juga sampe jengkel mbak diajak maju ko ga mau. Jadi perlu adanya pendekatan secara khusus agar mereka mau menjadi calon warga belajar maka saya biasanya saya minta tolong ke bu RT, bu Kadus, bu Ketua PKK atau ke Tutornya untuk merekrut calon warga belajar, lha terus blngkonya dari mereka disetorkan kesaya mbak.” (wawancara tanggal 14 September)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa untuk merekrut calon warga belajar bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi butuh adanya kesabaran dan pendekatan secara psikologis yang tepat. Permasalahan buta aksara bagi seseorang terkadang menjadi persoalan yang sensitif dan sebagian besar dari para penderita buta aksara malu mengakuinya. Akan tetapi pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo tidak langsung menyerah untuk menghadapi persolan tersebut mereka menggunakan strategi bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dan para tokoh masyarakat agar warga penderita buta aksara bersedia direkrut menjadi calon warga belajar keaksaraan fungsional. Berikut ini penuturan Ibu Murtini selaku penyelenggara serta ketua tim pengerak PKK desa Lemahbang :

“.... dulu saya diundang untuk diberi arahan tentang penyelenggaraan pendidikan pemberantasan buta aksara oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo mbak, kemudian saya diminta menjadi penyelenggaranya, terus saya diberi blanko oleh salah tugasnya untuk mendata

calon warga belajarnya, karna kebetulan saya aktif di PKK ya saya sebarakan lewat pertemuan PKK, dalam pertemuan itu kadang saya juga menerangkan arti pentingnya kegiatan ini serta memotivasi mereka agar mau mengikuti kegiatan ini, ya alhamdulillah ahirnya kami dapat memenuhi target yang diberikan dari UPT.” (wawancara tanggal 30 September 2009)

d. Pengajuan Proposal pendidikan Keaksaraan Fungsional

Setelah dapat ditentukan siapa saja yang bersedia menjadi calon penyelenggara, calon tutor dan calon warga belajar maka untuk mendapat bantuan dana untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional pihak Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo mengajukan proposal pendidikan keaksaraan fungsional. Proposal Pendidikan keaksaraan fungsional diajukan kepada penyandang dana kegiatan keaksaraan fungsional yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar untuk dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II (APBD II) Kabupaten Karanganyar.
- 2) Dinas Pendidikan Privinsi Jawa Tengah untuk dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I (APBD II) Jawa Tengah.
- 3) Departemen Pendidikan untuk dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berikut ini penuturan, Bapak Tarwanto selaku Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo tentang mekanisme pengajuan proposal kegiatan keaksaraan fungsional :

“..... Sumber dana keaksaraan fungsional ini ada yang dari APBN, APBD I, APBD II. Untuk meraihnya berdasarkan pengalaman tahun kemarin didasarkan pada data sasaran pemberantasan buta aksara tahun tersebut dalam bentuk proposal kemudian diajukan ke Disdikpora. Lha, nanti Disdikpora kabupaten kan dapat alokasi dari provinsi, alokasi dari provinsi itu disosialisasikan, kemudian dibagi secara proporsional berdasarkan data sasaran pada setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar, ke 17 kecamatan itu lho mbak. Contohnya gini mbak, katakanlah berdasarkan alokasi dana yang dari propinsi misalnya dana dari provinsinya 1000 warga belajar, Jumapolo punya

sasarang 100 warga belajar, sedangkan Jaten punya sasaran warga belajar, lha ini nanti di prosentase kan. Jadi kita dapat 10 % dan Jaten dapat 5 % dari dana yang dialokasikan dari provinsi. Kecamatan yang memiliki sasaran banyak ya dapat bagian banyak, kecamatan yang memiliki saran sedikit ya dapat sedikit. Pada dasarnya setiap kecamatan menggarap pemberantasan buta aksara, lha nanti kalau ada yang masih sisa digarap tahun depannya “ (wawancara tanggal 8 September 2009)

Ibu Sri Mulyani selaku penilik pendidikan luar sekolah (PLS) UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo mengungkapkan selain berdasarkan alokasi sasaran ada juga proposal yang sifatnya di kompetisikan mengingat keterbatasan dana dalam pemberantasan buta aksara. Hal ini berdampak pada kualitas penyusunan proposal yang harus disusun secara akurat dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Berikut wawancaranya :

“.... Dana untuk pemberantasan buta aksara itu kan sifatnya terbatas mbak, jadi ada proposal yang berdasarkan jumlah sasaran dan ada juga poposal yang dikompetisikan. Lha, konsekuensinya gimana ya kami harus membuat proposal itu sebaik mungkin dan sesuai dengan keadaan di masyarakat, tidak boleh asal-asalan apalagi dibesar-besarkan jumlahnya agar dana yang di dapat juga besar. Lha kenapa begitu karena nanti ada verifikasi dari penyandang dana, nak APBN ya dari pusat, APDD I ya dari provinsi, dan kalo APBD II ya dari pihak kabupaten. Jadi urutan-urutanya gini mbak, dari penyelenggaraan kami sosialisasikan untuk membuat proposal kemudian diserahkan ke UPT, lha terus tugas UPT adalah memeriksa proposal tersebut kalo sudah sesuai dengan ketentuan ya kita ACC untuk diajukan ke Disdikpora Kabupaten yang belum ya kita arahkan untuk dibetulkan, kemudian di Disdikpora kabupaten juga masih diperiksa lagi untuk mendapat rekomendasi, lha baru yang benar-bebar di rasa baik dikirim ke pusat. Selanjutnya dari pusat melakukan verifikasi proposal tersebut kalo keadaannya sama dengan yang ada di proposal kemudian diadakan MOU, lha habis itu semua dananya baru bisa cair mbak.” (wawancara tanggal 12 September 2009)

Adapun ketentuan sistematika penyusunan proposal pendidikan keaksaraan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Halaman depan (Sampul) memuat :
 - a. Judul Proposal

- b. Nama Lembaga Pengusul
 - c. Alamat lengkap lembaga pengusul : nama jalan; desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos, nomor telpon/HP dan nomor faksimile.
2. Lembar pengesahan oleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten / kota.
 3. Kata pengantar.
 4. Daftar isi.
 5. Isi proposal, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II. RENCANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL.

- A. Program pembelajaran.
- B. Proses Pembelajaran.
- C. Tempat dan Waktu Pembelajaran.
- D. Warga belajar yang dibelajarkan (termasuk target atau sasaran yang ingin dicapai).
- E. Potensi dan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional.
- F. Pembiayaan, termasuk rinciannya.
- G. Sarana dan prasarana pendukung.
- H. Dukungan masyarakat dan daerah setempat.
- I. Struktur organisasi dan uraian tugasnya.

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

- A. Daftar calon warga belajar.
- B. Daftar calon tutor.
- C. Struktur organisasi dan uraian tugasnya.

D. Jadwal pembelajaran dan persyaratan teknis administrasi.

2. Pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional.

Pendidikan keaksaraan fungsional merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo sebagai salah satu birokrasi dalam bidang pendidikan turut serta mendukung terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional guna memberantas buta aksara di wilayah kecamatan Jumapolo. Hal ini tercermin dalam salah satu misi yang ingin dicapai oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam mencapai visinya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dalam rangka memberdayakan masyarakat dibidang pendidikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tarwanto selaku Kepala oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo:

“ Sebagai salah satu organisasi publik, UPT ini ya tentunya punya visi yang kemudian dijabarkan dalam misinya, lha salah satu dari misi UPT ini adalah ini mbak meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan. Nah poin ini sangat cocok dengan adanya gerakan pemberantasan buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo ini. Maksudnya begini mbak, masyarakat yang buta aksara itu kita ajak untuk ikut pendidikan keaksaraan fungsional yang diadakan oleh UPT, kemudian mereka beri pengetahuan baca tulis dan hitung juga ada keterampilan sehingga kemampuannya bisa meningkat. Harapannya setelah mereka mengikuti pendidikan tersebut mereka bisa lebih produktif, maju, mandiri. Jadi antara program pemberantasan buta aksara dengan visi dan misi UPT ini saling mendukung mbak.” (wawancara tanggal 8 September 2009)

Pada dasarnya program pemberantasan buta aksara merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Masyarakat yang menderita buta aksara pada umumnya dekat dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketinggalan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga perlu adanya penanganan yang intensif terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional. Pendidikan keaksaraan fungsional merupakan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan berhitung serta keterampilan dan sikap yang bisa diterapkan oleh warga belajar untuk memecahkan masalah dalam

kehidupan sehari-hari agar bisa hidup mandiri dan sejahtera. Kesejahteraan itu tidak hanya dari segi materail (harta benda) saja akan tetapi juga termasuk kesejahteraan yang bersitat immaterial (bukan harta benda) seperti perasaan senang, perasaan bangga, perasaan tenang dan kedamaian.

Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo menuturkan bahwa tujuan dari adanya penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo adalah untuk menuntaskan kebodohan, meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat Jumapolo. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah wawancaranya :

“ tujuan dari adanya pemberantasan buta aksara di sini ya untuk menuntaskan kebodohan yang ada di masyarakat, kalo mereka sudah pinterkan taraf hidup dan kesejahteraannya bisa meningkat to mbak. Kesejahteraan itu tidak hanya terlihat dari sandang, pangan, papan yang mereka miliki saja mbak, akan tetapi juga dari batinnya misalnya rasa senang, rasa bangga, kedamain, kepedean, keberanian, ketengan batin dan masih banyak lagi. Oleh karena itu mereka yang masih buta huruf itu, kita arahkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional agar mereka bisa melek huruf. Lha harapannya apa? Ya agar mereka itu bisa ikut mengakses perkembangan zaman ini guna mencapai hidup yang sejahtera dan tidak terbelakang lagi. Contohnya gini mbak, sekarangkan sudah banyak orang pake HP to mbak, kemana-mana orang selalu bawa HP agar komunikasinya lancar. Lha mereka yang tidak bisa baca tulis kan gak bisa pake HP itu to mbak, jadi proses komunikasinya jadi terhambat to mbak. Itukan sama sama tidak bisa ikut menikmati perkembangan zaman yang dapat membawa kerugian bagi mereka sendiri. Lha makanya mereka kita ajak untuk mengikuti KF ini agar bisa baca tulis hitung, dengan begitu mereka bisa ikut menikmati perkembangan zaman dan tidak dikatakan gptek lagi mbak, hal ini menjadi suatu kebanggan tersendiri bagi para warga belajar.” (wawancara tanggal 12 september 2009)

Pernyataan Ibu Mulyani tersebut dibenarkan oleh Ibu Tini seorang warga belajar Desa Kwangsan yang menyatakan bahwa :

“... iya mbak buta huruf itu mau ngapa-ngapain susah. Ya seperti yang mbak bilang tadi gak bisa mengikuti perkembangan zaman kaya pake HP sendiri. Jadi dulu kalo saya mau ngasih kabar ke sodara harus minta bantuan orang. Tapi setelah saya ikut kegiatan KF ini skarang saya sudah bisa pake HP sendiri” (wawancara tanggal 7 Oktober 2009)

Dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) yang semakin pesat ini, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal, agar masyarakat Indonesia bisa menyesuaikan perubahan tersebut agar bangsa berkembang ke arah kemajuan. Sebagai jalan utama, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan bisa membaca, menulis dan berhitung untuk memperluas wawasan seseorang. Oleh karena dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo, UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo mendapatkan target warga yang harus tergarap setiap tahunnya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih jelasnya berikut penuturan bapak Gunawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“.....oya tentu ada targetnya mbak, setiap tahun pasti ada target yang ditetapkan oleh Disdikpora berapa jumlah warga yang harus kami garap. Jadi bertahap mbak tahun ini sekian, lha sisanya digarap tahun depannya. Kalo semua langsung digarap kami yang kewalahan mbak, nanti hasilnya malah tidak bisa optimal. Oleh karena itu, pemberantasan buta aksara disini diprioritaskan dulu untuk mereka warga buta aksara yang masih dalam usia produktif, mereka yang putus sekolah kelas 1-3 SD, dan mereka dari keluarga miskin.”
(wawancara tanggal 14 September 2009)

Berikut ini target yang harus digarap oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara tahun 2009 :

Tabel. III. 2
Target Pemberantasan Buta Aksara
Kecamatan Jumapolo Tahun 2009

Sumber Dana	Target (Kelompok)		
	Pemberantasan	Pembinaan	Pelestarian
(1)	(2)	(3)	(4)

APBN	10	-	-
APBD I	-	65	40
APBD II	-	-	10
Jumlah	10	65	50

Sumber : Disdikpora Kab. Karanganyar

Dengan adanya kerja keras dari UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional guna memberantas buta aksara di Kecamatan Jumapolo membuahkan hasil yang tidak mengecewakan, karena target yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar dapat terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional pada setiap desa diseluruh wilayah Kecamatan Jumapolo. Untuk lebih jelasnya akan di sajikan dalam tabel III. 3 berikut ini :

Tabel. III. 3
Rekapitulasi Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional
Kecamatan Jumapolo Tahun 2009

No.	Desa	Penderita Buta Aksara	Kelompok Belajar	Warga Belajar	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Paseban	153	9	141	92
2.	Lemahbang	102	5	91	89
3.	Karangbangun	153	8	141	92
4.	Ploso	127	9	121	95
5.	Giriwondo	166	9	158	95
6.	Kadipiro	213	11	204	95
7.	Jumantoro	301	18	293	97
8.	Kedawung	236	11	204	86
9.	Bakalan	228	16	218	95
10.	Jumapolo	199	13	186	93
11.	Kwangsan	120	10	112	93
12.	Jatirejo	275	6	271	98
	Jumlah	2.273	125	2.140	94

Sumber : UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penderita buta aksara bersedia mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional yang di selenggarakan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo. Akan tetapi masih ada sebagian kecil dari para penderita buta aksara yang belum bersedia mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional yang di selenggarakan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo, hal ini sebabkan karena masih ada masyarakat yang kurang memperdulikan pentingnya pendidikan keaksaraan fungsional bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya. Disamping itu juga disebabkan karena faktor pekerjaan dari para penderita buta aksara sehingga mereka tidak bisa mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional yang ada.

Pendidikan keaksaraan fungsional tahap pemberantasan diselenggarakan selama enam (6) bulan, tahap pembinaan selama empat (4) bulan, dan untuk tahap pelestarian selama tiga (3) bulan. Kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan seminggu dua kali (3X) dengan lama setiap pertemuan kurang lebih 120 menit (2 jam). Pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu :

a. Tahap pemberantasan (keaksaraan dasar)

Tahap pemberantasan diperuntukan untuk mereka yang belum memiliki keterampilan dasar baca tulis hitung (calistung), dan belum mengerti arti sebuah kalimat dengan jelas. Materi pembelajaran yang diajarkan pada tahap ini adalah materi calistung (baca, tulis, hitung) dasar mulai dari pengenalan huruf dan bilangan, merangkai dan menulis suku kata, sampai pada merangkai dan menulis kalimat pendek. Untuk lebih jelasnya berikut ini penjelasan Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo tentang materi pembelajaran pendidikan keaksaraan fungsional pada tahap pemberantasan :

“..... Pada tingkat dasar materi yang disampaikan hanya calistung warga (baca, tulis, hitung) saja. Ini tarafnya setara dengan materi kelas tiga SD cawu satu, kalo semester ya semester satu. Pada tahap ini warga belajar dikenalkan dengan huruf dan angka kemudian bertahap ke suku kata, kata, sampai pada kalimat pendek tetapi masih di bimbing oleh tutornya. ” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Hasil yang ingin dicapai dalam tahap ini adalah warga belajar dapat membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana serta tutor diharapkan dapat membantu warga belajar untuk menghilangkan pikiran dan perasaan tidak mampu.

b. Tahap pembinaan (keaksaraan lanjutan)

Pada tahap pembinaan ini diperuntukan bagi para warga belajar yang sudah lulus tahap pemberantasan sehingga warga belajar mengerti huruf dan bilangan, serta bisa membaca, menulis dan berhitung secara sederhana, akan tetapi mereka belum bisa menggunakan kemampuan fungsionalnya. Ketampilan baca, tulis, hitung dari para warga belajar belum mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, pada tahap ini tutor membantu mereka dengan menggunakan bahan ajar dari kehidupan sehari-hari, serta disertai tindakan aksi sehingga sedikit demi sedikit warga belajar bisa mengembangkan kemampuan fungsionalnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Berikut ini penjelasan Ibu Sri Mulyani Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo tentang materi pembelajaran pendidikan keaksaraan fungsional pada tahap pembinaan (lanjutan) :

“..... kalo di tahap lanjutan ini sudah ada aksinya. Kalo tadi kan cuma calistung saja tapi kalo tahap ini sudah jadi calistung dasi, membaca, menulis, berhitung dan aksi. Lha calistung dasi ini sifatnya sudah pada tindakan aksi. Pada tahap ini warga belajar sudah tidak dituntun lagi seperti pada tahap pemberantasan, mereka harus sudah sampai pada paragraf bahkan sampai pada wacana. Lha ini juga disertai tindakan-tindakan action misalnya menulis surat, menulis resep, mengisi formulir dengan benar, menunjuk mana yang KK, mana yang akta kelahiran, mana yang akta tanah, dan lain sebagainya. Jadi lebih pada penerapan keaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini juga ada praktek keterampilan hidupnya. Misalnya ada materi jamu gendhong, setelah dia bisa menulis resepnya, cara membuatnya, kemudian bersama-sama dipraktikkan.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Dalam tahap pembinaan warga belajar diharapkan sudah bisa menulis, membaca, berhitung secara lebih lancar serta dapat mengembangkan kemampuan fungsionalnya, misalnya dapat mengisi formulir, menulis kwitansi, membaca petunjuk.

c. Tahap pelestarian (mandiri)

Pada tahap pelestarian bertujuan untuk membentuk sikap agar warga belajar terus-menerus belajar atau menggunakan kemampuan baca, tulis, hitung (calistung) yang telah dimilikinya agar tidak kembali buta aksara. Untuk itu, perlu adanya materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan warga belajar. Dalam tahap pelestarian diharapkan warga belajar dapat menggunakan kemampuan baca, tulis, hitung (calistung) serta potensi diri dan lingkungan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memecahkan masalah dalam hidupnya serta dapat membuka

jalan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupannya. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo:

“.....Pada tahap mandiri ini diharapkan warga belajar tahu potensi dirinya dan potensi lingkungannya. Misalnya potensi dirinya sebagai pedagang bubur. Terus juga dilihat potensi disekitarnya gimana? Apa jualan di rumah saja atau jualan di pasar? Kalo di rumah yang belikan cuma lingkungan sekitarnya, lha kalo di pasar bisa orang banyak. Terus dengan tahu potensi diri dan lingkungannya dia bisa lebih mandiri dan lestari. Kalo dulunya cuma dagang pendhak paing dan wage sekarang bisa setiap hari jualan terus. Juga diharapkan bisa menjalin kemitraan dengan pihak lain, misalnya dia nitipke dagangannya ke tukang sayur, atau bisa di titipke ke warung-warung sekitarnya. Lha, harapan dari semua itu adalah adanya kemandirian usaha dan peningkatan pendapatan sehingga kesejahteraan hidupnya juga bisa naik.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Pemberian materi pendidikan keaksaraan fungsional tidak harus seperti yang ada pada modul pembelajaran akan tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar, untuk menyikapi hal tersebut pihak UPT PUD NFI dan SD memberikan arahan kepada para tutor untuk membuat tematik pembelajaran keaksaraan Fungsional. Pembuatan tematik pembelajaran keaksaraan fungsional berfungsi sebagai arahan untuk tutor dalam mengajar warga belajar agar tidak menyimpang dari modul pembelajaran yang ada sehingga dapat mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Tematik pembelajaran keaksaraan fungsional berisi materi-materi yang relevan dengan kebutuhan warga belajar daerah setempat serta harus memenuhi standar kompetensi yang ada. Untuk lebih jelasnya berikut penuturan Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“..... ya memang benar mbak, tidak tidak semua materi yang ada di modul tidak dapat disamapaikan semua, selain karena keterbatasan waktu pembelajaran juga karena materi yang ad di mudul itu kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut, caranya dengan membuat tematik pembelajaran KF. Kami mengarahkan para tutor untuk membuat tema-tema pembelajaran, kalo di Sekolah rencana pembelajaran itu lho mbak. Tematik pembelajaran itu berasal dari materi-materi yang dianggap penting dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, tetap mengacu sesuai dengan standar kompentensi yang ditentukan, sehingga para warga belajar bisa tetap lulus saat evaluasi dilaksanakan dan

bisa mendapatkan SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara).”
(wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Disamping materi baca, tulis, hitung (calistung) para warga belajar juga dibekali keterampilan fungsional yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Keterampilan fungsional yang diajarkan merupakan keterampilan yang berkaitan dengan potensi yang ada pada daerah setempat. Hal ini dimaksudkan agar warga belajar bisa memanfaatkan apa yang tersedia disekitarnya untuk dijadikan bahan baku produk tertentu agar nilai jualnya lebih tinggi.

Keterampilan yang diajarkan biasanya adalah mengolah makanan. Keterampilan ini dipilih karena sebagian besar warga belajar adalah kaum ibu-ibu rumah tangga yang gemar memasak dan mencoba resep baru. Selain hal tersebut, mereka pasti memiliki peralatan dapur sebagai sarana prasana untuk mengaplikasikan keterampilannya sehingga tidak dibutuhkan pengadaan sarana dan prasana baru. Berikut ini penuturan Saudara Ninuk selaku tutor di Desa Jumapolo :

“..... Di sinikan banyak kacang dhek, jadi kita manfaatkan hasil pertanian tersebut. Biasanya kalo dijual kacang mentahan saja kan murah dhek, apalagi kalo lagi panen kadang cuma laku lima ratus perkilonya. Agar lebih besar nilai jualnya maka warga belajar disini diberikan keterampilan mengolah kacang tersebut agar untuk menjadi makanan kecil ya seperti rempeyek kacang, kacang bawang, kacang telur, kacang ampyang , kacang oven. Walaupun pada dasarnya mereka bisa membuatnya sendiri, tapi kita arahkan mereka agar bisa membuat hasil masakan tersebut bisa enak, menarik dan laku dijual. Untuk itu kami mendatangkan orang yang benar-benar ahli di bidangnya, jadi ngak asal-asalan. Misalnya untuk membuat kacang telur ya kami undang mereka yang benar-benar ahli bikin kacang telur. Dengan begitu warga belajar tahu komposisi yang pas untuk membuat kacang telur, berapa kacangnya, berapa telurnya, berapa gulanya, berapa tepung, dan bahan lainnya. Kalo komposisinya ngak pas bisa-bisa ngak jadi kacang telur, contohnya kalo gulanya kebanyakan nanti digoreng baru sebentar bisa gosong padahal dalamnya belum masak, kan jadinya malah produk gagal to dhek. Lha makanya kita undang orang yang ahli di bidangnya, selain komposisi bahannya diajarkan pula tahap memasaknya, sampai pada pengemasannya agar bisa menarik dan laku dijual.” (wawancara tanggal 30 September 2009)

Selain itu, Ibu Hastutik tutor Desa Jatirejo juga mengungkapkan bahwa di kelompok belajarnya juga beri pengetahuan keterampilan fungsional yaitu membuat keripik. Berikut wawancaranya :

“..... oya ada mbak keterampilan fungsionalnya, kalo ditempat saya membuat keripik mbak, ya seperti kripik singkong, kripik tales, kripik pisang dan kripik tempe. Agar kripik tersebut bisa renyah, enak dan bisa laku dijual kan perlu keahlian khusus dalam pembuatannya. Ada kan mbak kripik tales yang kalo dimakan itu, lidahnya malah gatal-gatal. Lha, biar ngak gatal-gatal itu bagaimana caranya itu kita kasih tipsnya pada warga belajar. Selain itu, rasa juga dibikin banyak, ada rasa ayam, rasa jagung bakar, rasa pedas manis, rasa balado, rasa keju, jadi ngak cuma semacam aja bisa dibuat macem-macem variasi.” (wawancara tanggal 30 September 2009)

Selain membuat masakan olahan ada juga bentuk keterampilan lain yang diajarkan dalam pendidikan keaksaraan fungsional yaitu keterampilan membuat anyaman, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gunawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“ selain keterampilan masakan olahan ada juga keterampilan menganyam mbak, misalnya di desa kadiporo itu warga belajarnya diajarkan membuat anyaman dari bambu karena disana banyak pohon bambunya, jadi kami arahkan mereka untuk membuat anyaman bambu ya yang sederhana dulu membuat caping, tumbu, keping, tenggok, kan lumayan mbak kalo mereka lagi longgar bisa nganyam terus bisa dijual. Selain anyaman bambu juga ada anyaman dari mendong untuk buat tikar. Ini memang salah satu tujuan dari adanya KF ini, yaitu tadi agar masyarakat bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya untuk mensejahterakan hidupnya” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

3. Evaluasi pendidikan keaksaraan fungsional

Dalam rangka peningkatan kualitas lulusan pendidikan keaksaraan fungsional, pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga melakukan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kelompok belajar dalam menambah pengetahuan masyarakat tentang keaksaraan. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara bertingkat mulai dari evaluasi harian pada saat pembelajaran, evaluasi berdasarkan pada tematik, serta evaluasi ahir atau uji kompetensi. Evaluasi harian dan tematik hanya dilakukan oleh tutor pendidikan keaksaraan fungsional yang bersangkutan. Sedangkan pada evaluasi ahir atau saat uji kompetensi dilakukan oleh tim wajar dari kecamatan dan ada perwakilan

dari kabupaten yang langsung terjun mengevaluasi kelompok belajar.

Bentuk evaluasinya adalah para warga belajar diberi soal langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang sesuai standar kompetensi yang telah ditentukan, kemudian dikerjakan dan diberi skor sesuai dengan benar salahnya. Pada umumnya materi tes yang diberikan adalah sesuai dengan kurikulum pendidikan keaksaraan fungsional yang telah diajarkan yaitu yang berhubungan membaca, menulis, dan berhitung serta tentang ketrampilan fungsionalnya.

Berikut ini penjelasan Ibu Titik selaku Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Kecamatan Jumapolo mengenai pelaksanaan evaluasi belajar pendidikan keaksaraan fungsional :

“ oya tentunya ada monitoring juga ada evaluasi belajarnya. Evaluasi kami lakukan secara harian, pada saat pertemuan, kemdian pada ahir penyampain tematik, serta pada saat tes uji kompetensi. Evaluasi harian dan tematik dilakukan oleh tutornya, kalo yang uji kompetensi diawasi langsung dari tim wajar dari kecamatan dan ada perwakilan dari kabupaten. Soalnya langsung di drop dari privinsi jadi bukan kami yang buat. Soalnya ya seputar calistung sesuai dengan yang telah diajarkan.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Dari berbagai wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pendidikan keaksaraan fungsional yang ada di Kecamatan Jumapolo tidak hanya semata-mata bertujuan agar warga belajar bisa baca tulis dan hitung saja tetapi juga warga belajar harus bisa memanfaatkan kemampuan baca tulis hitungnyanya serta membekali warga belajar dengan ketampilan fungsional yang langsung bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semua pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan tersebut diajarkan dalam rangka untuk mengembangkan pola pikir dan wawasan para warga belajar supaya bisa lebih kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah hidupnya dengan memanfaatkan potensi yang tersedia disekitarnya. Dari adanya pendidikan keaksaraan fungsional ini diharapkan agar warga belajar bisa hidup mandiri dan tidak tergantung orang lain serta bisa meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi masyarakat yang sejahtera maju dan memiliki kemampuan untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini.

B. Responsivitas.

Responsivitas menggambarkan secara langsung kemampuan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menanggapi dan memenuhi kebutuhan,

keluhan, tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo. Dalam operasionalnya responsivitas UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara dengan sejauh mana organisasi tersebut merespon, mengatasi, menjawab dan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam permasalahan buta aksara di wilayah kerjanya. Dalam upaya pemberantasan buta aksara sikap responsiv UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam tidak hanya ditujukan kepada penderita buta aksara saja sebagai sasaran program, akan tetapi juga ditujukan kepada tutor, penyelenggara dan aparat pemerintah setempat untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Sikap responsif pada penderita buta aksara diwujudkan dengan mengintensifkan sosialisasi pemberantasan buta aksara, sehingga mereka bersedia mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional. Dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional jadwal materi yang ada disesuaikan dengan kebutuhan para warga belajar. Selain itu pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga memberikan motivasi belajar kepada para warga belajar agar pendidikan keaksaraan fungsional bisa berjalan dengan baik. Responsivitas pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo kepada tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional ditujukan dengan dibentuknya forum tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional. Sedangkan responsivitas pada aparat pemerintah setempat yaitu dengan melakukan kerja sama dan koordinasi secara intensif agar pemberantasan buta aksara bisa berjalan secara sinergis dengan dukungan dari aparat pemerintah setempat. Untuk lebih jelasnya berikut ini uraiannya :

1. Responsivitas pada penderita buta aksara.
 - a. Pengintensifan sosialisasi.

Untuk mendapatkan data yang akurat, sangat diperlukan ada sikap responsiv dari aparat responsivitas UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo. Pendataan jumlah penduduk yang masih menderita buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo, memerlukan suatu strategi yang khusus agar data tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Permasalahan buta aksara sering kali menjadi hal yang sensitif bagi para penderita buta aksara. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan secara khusus agar warga yang menderita buta aksara bersedia terbuka dengan keadaannya dan bersedia mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional guna memberantas buta aksara.

Strategi khusus tersebut dilakukan dengan mengintensifkan sosialisasi pemberantasan buta aksara untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang ada di masyarakat, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat, seta warga masyarakat Kecamatan Jumapolo. Dengan adanya sosialisasi yang jelas

diharapkan seluruh stakeholders yang ada di masyarakat bersedia bekerja sama dan berpartisipasi dalam pemberantasan buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo.

Dalam upaya pemerataan sosialisasi pemberantasan buta aksara, pihak UPT PUD NFI dan SD membentuk kader pemberantasan buta aksara pada seluruh desa di kecamatan Jumapolo. Kader pemberantasan buta aksara terdiri dari orang-orang menjadi pemangku kepentingan di desa tersebut. Tujuan dari dibentuknya kader pemberantasan buta aksara adalah agar warga penderita buta aksara bisa lebih terbuka dan tergerak untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional sebagai jalan untuk memberantas buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo. Untuk lebih jelasnya berikut penuturan Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“... pada umumnya warga penderita buta aksara itu kurang berterus terang mengenai keadaannya apabila ada petugas yang langsung mendatannya. Sehingga untuk menyikapi hal ini, kita punya strategi khusus dalam hal ini yaitu dengan mengadakan sosialisasi yang intensif pada seluruh pihak yang ada di masyarakat, ya dari aparat pemerintah desanya dan para tokoh sesa setempat. Mereka kita jelaskan arah dan tujuan dari program ini samapii gamblang. Tindak lanjutnya kita jadikan mereka sebagai kader pemberantasan buta aksara di daerahnya. Kalo kita mintai bantuan untuk jadi mendata warga yang masih buta aksara juga langsung OK. Nah, kalo yang mendata itu pak RT tau pak Kadusnya kan mereka secara otomatis tau keadaan warganya, tau si A, si B yang masih buta huruf. Selain itu kalau mereka yang melakukan pendataan kepada warganya, warga akan lebih terbuka dan mau mengikuti pendidikan KF.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

- b. Flaksibilitas pendidikan keaksaraan fungsional sesuai dengan kebutuhan warga belajar.

Pendidikan keaksaraan fungsional berbeda dengan pendidikan belajar mengajar yang dilakukan secara formal di sekolah. Perbedaan tersebut adalah obyek atau sasaran dari pendidikan belajar mengajar tersebut kalau pendidikan secara formal di sekolah obyek atau sasarannya adalah anak usia sekolah sedangkan pada pendidikan keaksaraan fungsional adalah orang dewasa. Orang dewasa telah memiliki kebutuhan yang berbeda dalam proses pembelajaran. Kebutuhan tersebut antara lain :

- (1) Dalam proses pembelajaran orang dewasa menuntut perlakuan yang menghargai dirinya sebagai pribadi.

- (2) Dalam proses pembelajaran orang dewasa menuntut perlakuan yang menghargai pengalaman yang dimiliki sebagai bagian dari dirinya.
- (3) Orang dewasa lebih siap untuk belajar tentang sesuatu yang terkait dengan peran sosialnya.
- (4) Orang dewasa lebih berminat untuk belajar sesuatu yang dapat meningkatkan kehidupan keluarga dan pekerjaannya.
- (5) Orang dewasa lebih menyukai pembelajaran yang bersifat praktis dan realistik.
- (6) Orang dewasa akan belajar dengan tekun apabila yang dipelajari sesuai dengan kepentingannya.
- (7) Orang dewasa akan belajar dengan giat apabila yang dipelajari menarik bagi dirinya.
- (8) Orang dewasa akan belajar dengan tekun apabila yang dipelajari mudah dan dapat dipraktikkan.

Untuk bisa mengetahui minat dan kebutuhan warga belajar maka tutor pendidikan keaksaraan fungsional melakukan identifikasi kebutuhan warga belajar. Identifikasi kebutuhan warga belajar dapat dilakukan dengan tutor berdialog dengan warga belajar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gunawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“ pada awal pembelajaran yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan para warga belajar. Identifikasi ini sangat berguna untuk proses pembelajaran kedepannya. Tutor bisa melakukan dialog dengan warga belajar untuk mengetahui kebutuhan warga belajarnya. Dari sana nanti diketahui keadaan warga belajarnya oh warga belajar ternyata banyak yang ngak tau huruf babar blas, sehingga pemberian materi harus mulai dari awal. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan KF kedepannya.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Hal ini juga sesuai seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“Identifikasi kebutuhan warga belajar di lakukan di awal dhek. Pada saat perekrutan kita berikan formulir tapi berhubung warga belajarnya belum bisa baca tulis, jadi kita interview satu persatu. Dari hasil interview itukan bisa teridentifikasi orang-perorang. Misalnya bu Joyo dulu sekolah ngak?, kesibukan sehari-harinya apa?, terus

keterampilan apa yang diminati?, keterampilan apa yang bisa di tekuni?. Jadi dari situ ada fotonya dalam arti oh bu joyo tadi dulunya ngak sekolah babar-blas, kesibukannya tani di sawah, keterampilan sama sekali tidak punya sama sekali. Lha dari situ, kita bisa tawarkan keterampilan apa yang diminati. Serta bisa di buat kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional berikutnya antara tutor dan warga belajar. ” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Warga belajar pada umumnya juga memiliki kepentingan kesibukan yang berbeda-beda sehingga kegiatan belajar-mengajar pendidikan keaksaraan fungsional dilaksanakan secara flaksibel sesuai dengan kepentingan warga belajar. Jadwal pembelajaran, alokasi waktu pembelajaran, serta materi yang disampaikan disesuaikan dengan kepentingan warga belajar. Hal ini seperti yang penuturan Bapak Tarwanto selaku Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo :

“... pembelajaran keaksaraan fungsional itu kan, harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan minat dari para warga belajarnya. Jadi kita yang harus menyesuaikan kebutuhan warga belajar, bukan warga belajarnya. Ini harus kita lakukan karena para warga belajar adalah orang dewasa yang sudah memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Sebelum proses pembelajaran berlangsung ada kesepakatan antara tutor dan warga belajarnya untuk mengatur jadwal atau teknis pelaksanaannya.” (wawancara tanggal 16 oktober 2009)

Bapak Gunawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo juga menyatakan hal yang sama dengan yang diutarakan Bapak Tarwanto diatas. Berikut ini wawancaranya :

“... kalo masalah jadwal belajar kita sesuaikan dengan kebutuhan para warga belajarnya dhek. Kita tidak bisa memaksa harus hari ini, jam sekian. Kalo gitu nanti malah gak ada yang mau ikut. Habis pembukaan kegiatan KF, biasanya langsung saya langsung musyawarah dengan para warga belajar untuk mentukan jadwal dan alokasi waktu pembelajaran.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Kegiatan belajar mengajar tidak harus dilaksanakan pada pagi hari, tetapi bisa siang atau sore hari bahkan malam hari. Hal ini terjadi karena dipagi hari warga belajar sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini seperti yang di ungkapkan

oleh Ibu Suharti selaku tutor pendidikan keaksaraan fungsional desa Jumantoro :

“..... pelaksanaan pendidikan KF disini menyesuaikan dengan kebutuhan warganya mbak, ya tidak bisa pagi hari soalnya kalo pagi mereka bekerja kesawah. Jadi biasanya dilaksanakan siang hari sekitar jam setengah dua nanti selesainya kira-kira jam setengah empat.” (wawancara tanggal 30 September)

Sama hal dengan penuturan Ibu Suharti, Bapak Sungkono selaku tutor pendidikan keaksaraan fungsional desa Kadipiro juga menyebutkan bahwa waktu pembelajaran keaksaraan fungsional juga dilaksanakan sesuai dengan kepentingan warga belajarnya. Berikut wawancaranya :

“ Di tempat saya malah malam hari mbak, malam rabu dan malam sabt., soalnya para warga belajar longgarnya malam hari. Habis magriban ya kira-kira sampai jam 8.30.” (wawancara tanggal 30 September)

Pernyataan kedua tutor diatas diatas dibenarkan oleh oleh Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“..... Kalo menyangkut jadwal pembelajarannya kita serahkan menurut kesepakatan tutor dan warga belajarnya mbak. Pendidikan KF ini dilaksanakan secara luwes sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, karena yang kita hadapi ini orang-orang yang sudah punya kesibukan sendiri-sendiri jadi ya selonggarnya warga belajar mbak. Tidak harus pagi mbak, siang atau sore juga bisa bahkan ada yang minta malam juga tidak masalah.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Ibu Tini seorang warga belajar Desa Kwangsan yang menyatakan hal yang sama dengan yang diutarakan Ibu Sri Mulyani tentang fleksibilitas jadwal pendidikan keaksaraan fungsional. Berikut wawancaranya:

“..... Belajarnya kalo di sini siang mbak kira-kira jam dua sampe jam empat, hari selasa sama kamis. Tapi misalnya kalo pas jadwalnya kebetulan ada acara lain biasanya di ganti hari lainnya ” (wawancara tanggal 5 Oktober 2009)

Penyampaian materi keaksaraan fungsional juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari warga belajar. Pembelajaran dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan warga belajar. Selain itu, dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dari para tutor dalam penyampaian materi pembelajaran. Pada kenyataannya, mengajar orang dewasa jauh

lebih sulit dari pada mengajar anak usia sekolah pada pendidikan formal. Waktu tenaga, dan pikiran orang dewasa tidak bisa terkonsentrasi pada proses pembelajaran saja akan tetapi sudah telah habis terbagi-bagi dengan berbagai kepentingan lainnya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Berikut ini penuturan Ibu Hastutik tutor pendidikan keaksaraan fungsional Desa Jatirejo, dalam penyampaian materi pembelajaran :

“ awalnya pembelajaran di mulai dengan pengenalan huruf dan angka. Mulai dari A sampai Z kalo angka ya dari 0 sampai 9, tapi kalo angka kebanyakan mereka sudah bisa, jadi pembelajaran di fokuskan pada pengenalan hurufnya. Biar cepet sambil menghafal langsung kita praktekan. harus sabar mbak, membimbing satu-persatu warga belajarnya mulai dari memegang polpennya, kemudian cara menulis hurufnya, ada yang tulisanya kecil-kecil ada pula yang besar sebuku itu sampai penuh, tulisannya itu malah jadi lucu-lucu, ya mklum tangannya sudah kaku untuk nulis. Selain sabar kita juga harus telaten dalam membimbing mereka, harus di ulangi beberapa kali samapai mereka hafal. Setelah itu kita ajarkan baca dari satu kata kemudian naik jadi satu kalimat, kemudian bertahap sampai pada satu paragraf” .” (wawancara tanggal 30 September 2009)

Tahap selanjutnya warga belajar yang telah menguasai kemampuan dasar baca, tulis, hitung (calistung) diberikan materi-materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti mengisi formulir, menulis kwitansi, membaca daftar harga, membaca nota, membaca resep, membaca label obat dan sebagainya.

c. Penggunaan metode belajar yang bervariasi.

Dalam pembelajaran keaksaraan fungsional tutor dituntut harus bisa aktif dan kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan tatap muka dengan satu arah saja, akan tetapi juga melibatkan para warga belajar untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran keaksaraan fungsional dapat dilaksanakan dengan diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini tutor memberikan suatu isu yang familiar dalam kehidupan sehari-hari, kemudian warga belajar berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan tersebut berikut ini wawancara dengan Ibu Suharti selaku tutor pendidikan keaksaraan fungsional desa Jumantoro :

“ metode pembelajarannya banyak mbak, ngak cuma teori saja ada prakteknya, kadang juga diskusi kelompok.

Diskusinya ya berkaitan dengan materi yang ada, misalnya pada tema kita hari ini membahas tentang makanan sehat. Ini bisa kita jadikan untuk bahan diskusi “Makanan sehat itu yang bagaimana to?”. Warga belajar itu kita pancing untuk berpendapat tentang makanan sehat, nanti kita tulis satu persatu pendapatnya terus kita satukan. Oh, ternyata makanan sehat itu yang sayur hijau dan buah yang segar, makanan yang banyak vitaminnya, juga harus bersih. Selain itu juga didiskusikan cara masaknya, sebelum masak itu dicuci dulu sampai bersih, kalo bisa dengan air mengalir biar kotorannya yang nempel hanyut. Masaknya itu juga jangan terlalu masak biar ngak hilang vitaminnya. Oya mbak, juga pada variasi masakannya dari satu bahan dasar, biar ngak bosan makannya. Contohnya bayam itu ngak cuma disayur bening saja, juga bisa diriasi pake santen jadilah sayur bobor, kemudian bisa dibuat pecel, urap, oseng, juga bisa dibuat rolade buat lauk. Nanti masaknya juga bisa divariasai dengan sayur lainnya, biar ngak cuma itu-itu saja.” (wawancara tanggal 30 September 2009)

Selain metode belajar diatas dalam pendidikan keaksaraan fungsional dikenal adanya metode belajar jalan-jalan keaksaraan fungsional. Jalan-jalan keaksaraan merupakan suatu kegiatan observasi lingkungan belajar yang dilakukan melalui jalan-jalan pada suatu kawasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai obyek pembelajaran. Jalan-jalan keaksaraan fungsional dapat dilaksanakan pada tempat-tempat pelayanan publik yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan sehari-hari warga belajar. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan Bapak Gunawan Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“ ada berbagai metode yang digunakan dalam pendidikan KF ini mulai dari tatap muka penyampaian materi, pemberian tugas kelompok, diskusi, praktek dan ada yang namanya jalan-jalan keaksaraan fungsional. Jalan-jalan keaksaraan fungsional itu maksudnya gini mbak, para warga belajar kita ajak jalan-jalan ke suatu tempat suatu tempat tertentu yang dapat dijadikan sebagai obyek pembelajaran, misalnya ke kecamatannya belajar buat KTP atau KK. Disana kan kita bisa mengamati bagaimana cara membuat KTP, bisa langsung tanya ke petugasnya syarat-syaratnya apa saja?, bagaimana ngisi formulirnya?, alurnya gimana?, biaya yang harus dikeluarkan berapa?, kapan jadinya? Kalo gini warga kan bisa lebih dong kan mbak, jadi kalo warga butuh ngurus KTP ato KK ngak usah minta tolong orang lain. Jalan-jalan keaksaraan ini juga sebagai

sarana untu melepas kejenuhan dalam belajar. Ya itung-itung piknik.”(wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

d. Pemberian motivasi belajar.

Untuk menunjang keberlangsungan pendidikan keaksaraan fungsional sesuai dengan rencana yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya pemberian motivasi kepada para warga belajar agar secara konsisten mengikuti proses pembelajaran sampai nanti dinyatakan tuntas buta aksara dan mendapat surat keterangan melek aksara (SUKMA). Semangat para warga belajar untuk belajar cenderung lebih rendah dari anak usia sekolah, hal ini disebabkan karena warga belajar telah disibukan dalam berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, seorang tutor selain harus aktif dan kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran, tutor juga harus peka terhadap kondisi dari para warga belajar itu sendiri. Apabila semangat belajar para warga belajar sudah mulai menurun, maka tutor harus pandai menghidupkan suasana belajar agar kegiatan proses belajar-mengajar menjadi dinamis lagi.

Saudara Ninuk selaku tutor pendidikan keaksaraan fungsional desa Jumapolo menyatakan bahwa untuk menyemangati para warga belajar dalam proses belajar-mengajar biasanya diselingi dengan tepuk-tepuk tertentu atau nyanyian yang merupakan sebuah gubahan lagu yang familiar di masyarakat. Berikut ini wawancaranya :

“ cara melepas kejenuhan dari warga belajar, biasanya kita selingi dengan tepuk atau nyanyi. Saya diberi trik-trik khusus dari Bu Mul untuk menghidupkan suasana kalo Wbnya udah ngak semangat lagi. Salah satunya dengan mengubah lagu-lagu yang sudah banyak dikenal masyarakat dengan syair-syair yang dapat menyemangati para warga belajar. Contohnya lagu cicak-cicak didinding syairnya diganti jadi bapak-ibu semua mari kita belajar baca tulis dan hitung yeeesss.... sekarang pintar. ”
(wawancara tanggal 30 September 2009)

Seperti halnya diatas Ibu Suharti selaku tutor pendidikan keaksaraan fungsional Desa Jumantoro juga mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk memotivasi warga belajar agar bersemangat mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional adalah dengan memberikan makanan kecil. Berikut ini wawancaranya :

“.... untuk memotivasi para warga belajar agar terus masuk, kadang saya bawakan makanan kecil, ya ngak seberpa sih mbak tapi itu dapat menyenangkan hati para

warga belajar, karena mereka merasa diperhatikan. Hal ini akan berdampak positif pada kegiatan belajar yang ada.” (wawancara tanggal 30 September)

Selain dua hal diatas, ada berbagai hal yang dilakukan oleh PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam menumbuhkan motivasi atau semangat belajar dari warga belajar agar secara berkelanjutan mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional. Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo yang menerangkan berbagai tips dalam memotivasi warga belajar agar selalu mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional :

“... motivasi belajar atau penyemangat belajar disini disebut dengan ragi belajar mbak. Ragi belajar itu wujudnya banyak ada dengan pembelian seragam, jadi kalo pas masuk warga belajar iuran nanti kalo sudah terkumpul di belikan sragam. Kemudian diberi foto, warga itu kalo difoto satu persatu seneng, apalagi nanti kalo difoto bareng-bareng tambah seneng lagi. Kadang juga di beri snack atau door prize, kalo saya pas lagi monitoring ke kelompok biar warga belajarnya jadi terkesan. Kita bawa door proze kecil-kecilan ya seperti sikat, sabun mandi, sabun colek, alat-alat dapur walaupun harganya ngak seberapa tapi mereka senang. Lha nanti disana kita tes mereka yang bisa jawab bisa ambil door prizanya duluan. Inikan bisa memacu warga belajar untuk terus belajar” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Motivasi belajar tidak hanya bersifat fisik seperti yang disebutkan diatas akan tetapi juga bisa bersifat non fisik seperti adanya ungkapan pujian dari tutor kepada warga belajar yang berprestasi, ada pula yang dijadikan tutor sebaya, ketua kelas kelompok belajar tersebut, bahkan ada yang direkrut menjadi kader perberantasan buta aksara di desa tersebut. Tujuan dari perekrutan warga belajar yang berprestasi menjadi kader perberantasan buta aksara adalah untuk dijadikan informan mengenai warga masyarakat yang masih menderita buta aksara yang belum terdata karena yang bersangkutan tidak mau terbuka saat pendataan. Selain itu, diharapkan para informan tersebut juga bisa membujuk para warga yang masih menderita buta aksara agar bersedia mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional. Berikut ini penuturan Ibu Titik selaku Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Kecamatan Jumapolo:

“ kita sampaikan pada tutor untuk menginventaris warga belajarnya yang pandai untuk diusulkan menjadi kader pemberantasan buta aksara disini. Tujannya untuk memudahkan kita dalam pemberantasan buta aksara, mereka

... dapat dimintai informasi siapa saja warga di sekitarnya yang masih buta aksara tapi belum masuk di data, selain itu kita mintai bantuan kepada yang bersangkutan untuk mengajak tetangganya yang masih buta huruf tadi mengikuti kegiatan ini” (wawancara tanggal 16 Oktober 2009)

Pada kesempatan yang berbeda Bapak Gunawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo mengungkapkan pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para warga belajar yang dirasa aktif mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional yang sudah ada dengan mengikutsertakan para warga belajar dalam berbagai kegiatan tertentu antara lain dipercaya untuk mewakili UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam lomba tertentu, dalam upacara peringatan hari besar, karnaval, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya berikut wawancaranya :

“ kita sering mengikutkan warga belajar dalam even-even tertentu seperti kalo pas hari kasara itu kan ada lomba buat warga belajar, kemari itu ada lomba mengarang tingkat provinsi, warga belajar yang kita nilai bagus kita cari untuk diberikan informasi dan diberi teknisnya untuk mengarang terus kita kirim. Hasilnya juga ngak mengecewakan Alhamdulillah dapat juara satu , hadiahnya lima juta. Bahkan kita juga mendampingi untuk mengambil hadiahnya ke Wonosobo, akomodasi dantransportasinya di tanggung oleh UPT, jadia hadianya itu benar-benar utuh buat warga belajar tadi. Selain itu kita juga ikutkan para warga belajar dalam peringatan hari besar seperti upacara Hardiknas, upacara tujuh belasan, karnaval, kemarin juga ada yang dikirim ke festival jaranan di Jaten. Itu semua kita lakukan sebagai bentuk responsivitas kita terhadap para WB agar mereka terus bersemangat mengikuti pendidikan KF sampai tuntas.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

2. Responsivitas pada tutor dan penyelenggara.

Sikap responsiv pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara tidak hanya ditujukan untuk para warga belajar saja tetapi juga pada tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional. Pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo membentuk suatu forum tutor dan penyelenggara untuk mempermudah proses koordinasi antara pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dengan para tutor dan penyelenggara. Forum tersebut merupakan wahana bagi tutor dan penyelenggara untuk menyampaikan berbagai aspirasi, permasalahan

yang ditemui dalam pendidikan keaksaraan fungsional, serta dapat dijadikan sebagai tempat untuk bertukar pengalaman dari para tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional.

Forum tutor dan penyelenggara mengadakan pertemuan setiap bulan sekali. Dalam pertemuan tersebut juga membahas apa yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi oleh tutor dan penyelenggara dalam pendidikan keaksaraan fungsional, kemudian dicari solusinya bersama-sama. Untuk lebih jelasnya berikut wawancara dengan Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“.... bentuk responsivitas kita pada tutor dan penyelenggara yaitu dengan membentuk forum tutor dan penyelenggara KF. Setiap bulan sekali kita mengadakan pertemuan di kantor PKBM. Disana dibahas apa yang menjadi kendala tutor dan penyelenggara dalam pelaksanaan KF, selain itu juga di jadikan ajang untuk sharing antara sesama tutor dalam penyampaian materi keaksaraan fungsional” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Ibu Hastutik tutor pendidikan keaksaraan fungsional Desa Jatirejo mengungkapkan bahwa dengan adanya forum tutor ini sangat membantu tutor dalam melaksanakan pendidikan keaksaraan fungsional yang ada. Dari forum tersebut para tutor dapat bertukar pengalaman mengenai berbagai hal yang dapat dilakukan untuk menyukseskan pendidikan keaksaraan fungsional di Kecamatan Jumapolo. Untuk lebih jelasnya berikut ini wawancaranya:

“ menurut saya forum tutor dan penyelenggara yang ada ini sangat bermanfaat bagi para tutor. Di forum ini kita bisa tukar pengalaman dengan tutor di desa lain. Kita dapat mengadopsi metode belajar yang sudah berhasil praktekkan agar warga belajar bisa aktif dan kreatif. Di forum ini kita juga bisa menyampaikan apa yang jadi permasalahan kita kemudian dari pihak UPT dan teman-teman tutor lainnya ngasih masukan untuk mengatasi masalah tersebut.” (wawancara tanggal 30 September 2009)

3. Responsivitas pada aparat pemerintah setempat.

Selain itu pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga terus mengintensivkan jalannya koordinasi dengan aparat pemerintah dan tokoh desa setempat supaya gerakan pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo tetap berjalan lancar. Koordinasi yang intensif juga berfungsi untuk mensinergiskan berlajannya pemberantasan buta aksara. Selain itu dengan adanya koordinasi yang baik maka akan terjalin kerjasama yang baik pula diantara diantara para stakeholders di Kecamatan Jumapolo. Untuk lebih jelasnya

berikut ini wawancara dengan Bapak Tarwanto selaku Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo :

“ iya mbak, kami selalu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemberantasan buta aksara di sini, ya termasuk aparat pemerintah dan tokoh desa setempat. Kami selalu menyampaikan program-program yang ada pada saat rapat koordinasi di kecamatan, disanakan semuanya kumpul semua. Kami juga minta tanggapan dan saran dari para aparat dan tokoh setempat dalam pelaksanaan program tersebut.”
(wawancara tanggal 16 oktober 2009)

Dari berbagai wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo sangat responsif terhadap berbagai stakeholders dalam pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo. UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo sangat merespon apa yang menjadi kebutuhan para warga belajarnya kemudian berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga sangat perhatian terhadap tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional yaitu dengan membantu forum tutor. Disamping itu untuk mensinergiskan gerakan pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo pihak UPT PUD NFI dan SD juga mengintensivkan koordinasi dengan aparat dan tokoh setempat.

C. Akuntabilitas.

Akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara ditekankan pada sejauh mana kebijakan atau program-program yang dilaksanakan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pengentasan buta aksara tersebut konsisten dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Akuntabilitas UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara mencakup seluruh tahapan pemberantasan buta aksara yaitu mulai dari proses persiapan pendidikan keaksaraan fungsional, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, penyerahan surat keterangan melek aksara (SUKMA), serta tidak lanjut setelah pendidikan keaksaraan fungsional. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tarwanto selaku Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo :

“ pertanggungjawaban dalam pemberantasan buta aksara itu ya mulai dari awal pelaksanaan program sampai nanti program berahir. Mulai dari pendataan jumlah warga yang buta huruf, sosialisasi programnya, pelaksanaan program-program yang ada, sampai nanti uji kompetensi dan pemberian sukma, Surat Keterangan Melek Buta Aksara itu lho mbak serta tidak lanjut

setelah warga lulus itu digimanakan. Juga termasuk pelaporan kepada pihak-pihak terkait.” (wawancara tanggal 16 oktober 2009)

Akuntabilitas pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara ditunjukkan dengan adanya upaya pencarian data penderita buta aksara seakurat mungkin. Untuk menciptakan pendidikan keaksaraan fungsional yang berkualitas maka tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional direkrut dari orang-orang yang benar kompeten dalam pendidikan keaksaraan fungsional dan benar-benar memahami kondisi masyarakat. Pendaan pendidikan keaksaraan fungsional juga disampaikan secara transparan pada penyelenggara dan warga belajar. Pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga melakukan monitoring sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntabilitas secara formal pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara ditunjukkan dengan adanya pelaporan pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangnyar, serta pemberian surat keterangan melek aksara (SUKMA) pada warga belajar yang lulus uji kompetensi. Untuk lebih jelasnya berikut ini penjabarannya :

1. Akuntabilitas Pendataan penderita buta aksara.

Akuntabilitas UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam persiapan penyelenggaraan dapat ditunjukkan dengan adanya kerja keras dari para petugas UPT PUD NFI dan SD dalam pendataan penderita buta aksara di Kecamatan Jumapolo sehingga dihasilkan data seakurat mungkin, sesuai dengan keadaan yang ada dimasyarakat. Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh Bapak Gunawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“ Data itukan arsip nasional mbak, nanti dari sini kita laporkan kedinas, dari dinas terus samapai kepusat sehingga nantinya sampai ke pusat jadi arsip nasional. Oleh karena itu, harus dicari seakurat mungkin dan harus mendapat persetujuan aparat setempat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Data mengenai jumlah penderita buta aksara di Kecamatan Jumapolo sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya upaya pemberantasan buta aksara yang dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo. Data tersebut menjadi dasar penentuan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pihak UPT PUD NFI

dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara. Data tersebut dapat digunakan oleh pihak UPT PUD NFI dan SD untuk memperkirakan segala komponen yang diperlukan untuk menyukseskan pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo. Berdasar pada data tersebut pihak UPT PUD NFI dan SD dapat memperkirakan jumlah tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini penuturan Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“ data jumlah penderita buta aksara itu sangat penting mbak, wong itu sebagai dasar pijakan kita untuk langkah-langkah selajutnya. Makanya pada awal tahun kita mereview kinerja terdahulu untuk mengetahui berapa jumlah penderita buta huruf yang sudah kita garap dan berapa yang belum. Nah, yang belum ini dijadikan data garapan tahun ini, kami juga melakukan cek ulang lagi ke masyarakat kalo-kalo ada tambahan. Dari data itu kita dapat memprediksi jumlah tutor dan penyelenggara yang dibutuhkan, desa ini sekian, desa itu sekian.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

2. Profesionalisme tutor pendidikan keaksaraan fungsional.

Selanjutnya bentuk akuntabilitas UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara juga terlihat pada proses perekrutan tutor pendidikan keaksaraan fungsional. Tidak setiap orang dapat menjadi tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional. Tutor pendidikan keaksaraan fungsional dipilih berdasarkan persyaratan atau kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan prosedur yang ada serta harus benar-benar mengetahui kondisi daerah tersebut. Berikut ini penuturan Bapak Gunawan selaku penilik pendidikan luar sekolah (PLS) UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo mengenai pemilihan tutor pendidikan keaksaraan fungsional :

“.... Pemilihan tutor di sini ya disesuaikan dengan prosedur yang ada tapi lebih ditekankan pada aspek kemampuan, domisili, dan kesanggupan mbak. Kemampuan itu artinya diprioritaskan pada mereka yang berbegrund pendidikan, ya misalnya guru-guru atau para wiyata bakti, dengan harapan apabila ia seorang guru atau wiyata bakti ia lebih mudah membelajarkan karena dalam pendidikan keaksaraan fungsional pembelajarannya bersifat andragogik (pembelajaran orang dewasa). Kedua domisilinya maksudnya domisili dari tutor dekat dengan warga belajarnya harapanya tau kondisi daerah itu, lebih mudah adanya koordinasi, serta kalau domisilinya dekat dengan warga belajarnya kan bisa secara otomatis biasa mengurangi biaya transportnya to mbak. Terus yang ketiga

kesangguppannya ini berarti bahwa orang tersebut sanggup mengajar keaksaraan fungsional tidak. Walaupun sama-sama berbegrund guru kadang ada yang sanggup dan ada yang tidak. Nak, guru SD atau guru TK dari pengalaman yang sudah ada mereka lebih sanggup untuk menjadi tutor, berbeda dengan guru SMP atau guru SMA kadang beliaunya tidak sabar untuk mengajar warga belajar yang sudah sepuh-sepuh ini mbak, ataupun kalo sanggup banyak kendalanya. Jadi dari kesanggupan guru SD dan TK lebih sanggup dari guru SMP dan SMA. Oh iya mbak, diprioritaskan juga bagi mereka yang sudah mendapat pelatihan. (wawancara tanggal 14 September 2009).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap pemilihan tutor keaksaraan fungsional di Kecamatan Jumapolo. Tutor keaksaraan fungsional direkrut dari orang-orang benar-benar kompeten dalam bidang pendidikan sehingga ditekankan pada orang-orang berbegrund pendidikan yaitu dari para guru atau wiyata bakti yang merupakan lulusan sarjana pendidikan, lulusan dari Diploma II pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) atau Diploma II pendidikan guru taman kanak-kanak (PGTK) sedangkan kekurangannya diambil dari orang-orang yang minimal telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang ada dapat berkualitas karena semakin tinggi jenjang pendidikan tutor maka akan berpengaruh pada kemampuan tutor untuk bisa lebih lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan materi kepada para warga belajarnya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut dapat dilihat komposisi tutor keaksaraan fungsional Kecamatan Jumapolo berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel. III. 4

Komposisi tutor keaksaraan fungsional Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekolah Dasar	-	-
2.	Sekolah Menengah Pertama	-	-
3.	Sekolah Menengah Atas	25	20
4.	Diploma II	40	32
5.	Sarjana pendidikan	60	48
	Jumlah	125	100

Sumber : UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa dari segi kualitas dan kuantitas tutor keaksaraan fungsional yang ada telah mencukupi untuk

mengajar warga belajar. Akan tetapi, pada kenyataannya ada calon tutor pendidikan keaksaraan fungsional yang belum mendapat pelatihan secara formal sebagai salah satu syarat untuk menjadi tutor pendidikan keaksaraan fungsional dapat menjadi tutor pendidikan keaksaraan fungsional. Hal ini terjadi karena jumlah calon tutor yang mendapat pelatihan secara formal oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga jumlahnya sangat terbatas, sehingga kurang memenuhi kebutuhan tutor pendidikan keaksaraan fungsional yang diperlukan dalam pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo. Hal ini merupakan suatu bentuk diskresi terhadap suatu ketentuan yang dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara. Pelaksanaan ketentuan yang ada tidak dilakukan secara saklek oleh pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo karena harus disesuaikan dengan kondisi yang ada dimasyarakat akan tetapi tidak menyimpang dari ketentuan dasarnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini penjelasan Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“ pemilihan tutor itu memang harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, salah satunya adalah mengikuti pelatihan menutor dulu. Akan tetapi kenyataan dilapangan ngak bisa gitu mbak, tidak semua tutor mendapat pelatihan secara formal oleh disdikpora. Hal ini terjadi karena saat pelatihan quotanya terbatas, jadi ngak semua tutor yang kita ajukan bisa terakomodir untuk mengikuti pelatihan yang ada. Terus kalo nunggu semua dapat pelatihan dulu dari dinas, yo ngak jalannya pendidikan keaksaraan fungsionalnya padahal kitakan terbatas oleh waktu. Dalam hal ini ada sedikit keluwesan dalam menjalankan ketentuan yang ada, tapi yo kita terus berupaya untuk sesuai dengan peraturan yang ada.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Selanjutnya bapak Gunawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo mengungkapkan untuk menciptakan tutor yang profesional dalam pendidikan keaksaraan fungsional UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo melakukan pelatihan tutor. Materi yang diberikan pada saat pelatihan mengacu pada materi yang disampaikan pada pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari adanya pelatihan ini adalah agar para tutor yang belum sempat mendapat pelatihan secara formal oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar tetap bisa memahami dan mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan dan dilakukan oleh tutor keaksaraan fungsional sehingga proses belajar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikut ini wawancaranya :

“untuk meningkatkan kemampuan tutor yang belum mendapatkan pelatihan dari dinas, kita berinisiatif melakukan

pelatihan sendiri. Pelatihan itu di adakan saat pertemuan forum tutor. Walaupun ngak formal tapi materinya sama dengan yang diajarkan oleh dinas, jadi tutor ngak canggung lagi dalam mengajar WB. Mereka tetap bisa mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan saat mengajar, mengetahui materi yang diajarkan, mengetahui standar kompetensi yang ditetapkan.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

3. Tranparansi pendanaan pendidikan keaksaraan fungsional.

Akuntabilitas yang cukup tinggi dalam pemberantasan buta aksara oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga dapat dibuktikan dengan adanya tranparansi pendana pendidikan keaksaraan fungsional. Setiap proposal pendidikan keaksaraan fungsional yang mendapatkan persetujuan, dananya langsung ditransfer oleh penyandang dana ke rekening penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional. Selanjutnya pihak penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional melaporkan hal tersebut pada pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo. Untuk lebih jelasnya beriku ini penjelasan Ibu Titik selaku Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Kecamatan Jumapolo :

“ ... Dana KF itu langsung masuk kerekening penyelenggara mbak. Begini alurnya sebelum pengajuan proposal, calon penyelenggara diwajibkan untuk membuka rekening atas nama lembaga dengan tujuan apabila ada pergantian kepengurusan tidak usah membuka rekening baru. Selanjutnya dalam pengajuan proposal dilampirkan foto copy rekening penyelenggara tadi. Lha, nanti kalo proposalnya disetujui, dananya langsung masuk ke rekening tadi. Setelah itu, penyelenggara lapor ke sini bahwa dananya telah masuk. Kemudian penyelenggara dan pihak UPT membuat kesepakatan kapan bisa bertemu dengan para kelompok warga belajar untuk membagi dana tersebut. Pada hari yang telah ditentukan penyelenggara membagi dana tersebut dan disaksikan oleh pihak UPT. Selanjutnya pihak UPT memberikan pengarahan teknis penggunaan dana tersebut dan meminta penyelenggara untuk membuat laporan penggunaan dana tersebut.” (wawancara tanggal 16 oktober 2009)

Berikut ini perincian penggunaan dana pendidikan keaksaraan fungsional pada tiap kelompok pendidikan keaksaraan fungsional :

1. Bahan :
 - a. ATK warga belajar = Rp. 100.000,00
 - b. ATK kelompok = Rp. 230.000,00
2. Perjalanan :
 - a. Transport tutor 6 bln x Rp. 250.000,00 = Rp. 1.500.000,00

- b. Transport penyelenggara 6 bln x Rp. 250.000,00 = Rp. 600.000,00
- 3. Lain-lain :
 - a. Identifikasi warga belajar dan tutor = Rp. 50.000,00
 - b. Penilaian = Rp. 45.000,00
 - c. Bahan dan alat keterampilan = Rp. 600.000,00
- 4. Pelaporan = Rp. 45.000,00
- Total penggunaan dana = Rp. 3.170.000,00
- 4. Pelaksanaan Monitoring pendidikan keaksaraan fungsional.

Agar pelaksanaan sesuai pemberantasan buta aksara sesuai dengan rencana yang ada, pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo secara rutin melakukan pemantauan atau monitoring pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari warga belajar dan masalah yang dihadapi oleh dalam proses pembelajaran. Monitoring merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo pengendalian dan pembinaan yang terus-menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pendidikan keaksaraan fungsional. Prosesnya monitoring dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu yang menyangkut keadaan warga belajar, sarana belajar, proses dan isi belajar. Kegiatan monitoring perlu dilaksanakan secara rutin dan teratur, sehingga setiap masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional di lapangan dapat segera dicarikan jalan pemecahannya atau diberikan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo.

Monitoring dilakukan secara mingguan, bulanan dan akhir pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional. Untuk monitoring mingguan dan bulanan dilaksanakan sesuai kebutuhan oleh pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo. Petugas dari UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo melaksanakan monitoring dengan turun langsung meninjau ke lokasi pembelajaran. Berikut ini penjelasan Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo mengenai pelaksanaan monitoring pendidikan keaksaraan fungsional :

“monitoring dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional yang ada, kita tanya presensinya mana, laporan administrasinya mana, modul yang dipake apa, mana tematiknya. Terus kalo ada permasalahan kita berikan arahan untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti kemarin saat saya monitoring ke plosa ternyata ada buku administrasi yang belum digarap, maka kita minta untuk dikerjakan pada saat itu juga, nanti kalo ada yang kurang jelas dapat kita bantu langsung. .” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Selanjutnya penjelasan Ibu Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa temuan monitoring yang dilakukan oleh pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional tidak hanya temuan yang bersifat negatif akan tetapi juga temuan yang bersifat positif. Untuk lebih jelasnya berikut ini wawancaranya :

“ temuan itu bisa positif dan negatif. Yang positif misalnya oh, kelompok belajar sana kreatif dan aktif, kita tanya lagi belajarnya apa?. Lalu kita adopsi untuk kelompok lainnya agar mereka jadi aktif dan kreatif semua. Lha yan negatif atau belum baik itu kita bina, misalnya tematik yang digunakan kurang sesuai dengan standar kompetensi, ya kita arahkan agar memenuhi standar kompetensi yang ada.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Selain itu, untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional guna memberantas buta aksara di kecamatan jumapolo, sewaktu-waktu ada monitoring dari pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten, Provinsi maupun dari pusat. Monitoring tersebut dilakukan untuk memverifikasi apakah pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh penjelasan Bapak Gumawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo:

“ ada juga monitoring dari tim wajar kabupaten, provinsi bahkan dari pusat. Tim wajar dari pusat itu ya dari aparat disdikpora kabupaten, kalo yang dari provinsi ya petugas dari dinas pendidikan provinsi, kalo yang pusat ya dari departemen pendidikan. Kegiatan ya memeriksa segala hal yang berkaitan dengan upaya pemberantasan buta aksara disini, apa pendidikan keaksaraan fungsional sudah jalan sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

5. Pelaporan dan tindak lanjut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara formal pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo yaitu dengan melakukan pelaporan pelaksanaan pemberantasan buta aksara kepada atasannya. Mekanisme pelaporan berjenjang mulai dari laporan yang di buat oleh penyelenggara yang di sampaikan kepada pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo. Kemudian pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo melaporkannya kepada kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar kemudian di teruskan sampai ke pusat. Hal yang dilaporkan menyangkut meliputi :

- a. Jumlah warga belajar yang digarap.
- b. Proses pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional.
- c. Perincian penggunaan anggaran.
- d. Hambatan, masalah dan upaya pemecahannya.

Selain itu dalam laporan tersebut juga dilampirkan :

- a. Daftar nama warga belajar, pengelola dan tutor pendidikan keaksaraan fungsional.
- b. Jadwal kegiatan dan dokumen lainnya yang relevan.
- c. Rincian penggunaan dana serta bukti-bukti pengeluaran.
- d. Struktur tim penyelenggara.
- e. Foto kegiatan, dan bila memungkinkan kegiatan pembelajaran yang direkam dalam CD.

Selanjutnya bentuk pertanggungjawaban formal kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga bertanggungjawab secara formal kepada para warga belajar yaitu dengan memberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi mereka yang telah lulus uji kompetensi. Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) terdiri dari tiga tingkatan yaitu SUKMA I untuk mereka yang lulus uji kompetensi tingkat dasar. Bagi mereka yang memperoleh sertifikat tersebut berhak mengikuti tahap selanjutnya yaitu tahap pembinaan, dan apabila lulus mendapatkan SUKMA II. Setelah tahap kedua lulus, maka warga belajar tersebut bisa mengikuti tahap ketiga yaitu tahap pelestarian yang apabila lulus berhak mendapat SUKMA III.

Pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga bertanggungjawab secara moral kepada masyarakat untuk memelihara agar warga belajar yang sudah melek aksara tidak kembali buta lagi. Oleh karena itu pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo mengupayakan berbagai hal sebagai tindak lanjut pendidikan keaksaraan fungsional yaitu dengan membentuk berbagai program lanjutan yaitu :

- a. Kelompok belajar usaha mandiri
- b. Keaksaraan keluarga
- c. Koran ibu
- d. Taman bacaan masyarakat (TBM).

Serta bagi mereka yang memenuhi persyaratan akan di arahkan untuk mengikuti program kesetaraan. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“ pertanggungjawaban secara formal tentunya kami lakukan. Laporan ahir program kita tujukan pada Dinas, nanti dari Dinas diteruskan sampai pusat. Kami memberikan SUKMA sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap warga belajarnya. Selain itu, sebagai tanggungjawab moral kita juga melakukan tindak lanjut dari program ini agar mereka ngak buta huruf lagi. Kita buat kelompok belajar usaha mandiri, ada juga keaksaraan keluarga, koran ibu, taman bacaan masyarakat. Dan mereka yang memenuhi persyaratan kita bina untuk ikut program kesetaraan.” (wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas yang baik dalam pemberantasan buta aksara. Hal ini dapat terbukti dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas mulai dari proses pendataan warga yang masih menderita buta huruf, perekrutan penyelenggara dan tutor yang profesional, transparansi dalam pendanaan, pelaksanaan monitoring, pelaporan kepada pihak terkait, pemberian SUKMA, serta pada tindak lanjut setelah pendidikan keaksaraan berahir. Semua ini dilaksanakan oleh pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo agar tujuan yang ada dari pemberantasan buta aksara bisa terwujud yaitu untuk menghilangkan kebodohan dan menciptakan masyarakat yang mandiri.

B. Faktor Penghambat Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar (UPT PUD NFI dan SD) Kecamatan Jumapolo dalam Pemberantasan Buta Aksara.

Upaya pemberantasan buta aksara oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo tidak terlepas dari adanya berbagai permasalahan yang menghambat kinerjanya. Secara umum faktor penghambat kinerja UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam Pemberantasan Buta Aksara adalah keterbatasan dana pendidikan keaksaraan fungsional, adanya budaya masyarakat yang kurang terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional, mata pencaharian penduduk, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan fungsional. Untuk lebih jelasnya berikut ini penjabarannya :

1. Dana.

Dalam pelaksanaan suatu program, dana merupakan faktor penting yang sangat menentukan. Tanpa adanya dukungan dana yang memadai, mustahil suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Demikian pula, dengan pelaksanaan program pemberantasan buta aksara yang dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo, faktor pendanaan menjadi hal yang vital dalam mendukung keberlangsungan program tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam pelaksanaan program ini masih terkendala dengan adanya keterbatasan dana yang dialokasikan untuk pendidikan keaksaraan fungsional.

Keterbatasan dana ini disebabkan karena dana pendidikan keaksaraan hanya bersumber dari pemerintah. Tidak ada sama sekali pungutan biaya pendidikan kepada warga belajar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Titik selaku Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Kecamatan Jumapolo :

“...pendanaan Kf ya berasal dari pemerintah saja, kami ngak ada pungutan buat warga belajar. Wong belajarnya gratis saja masih ada yang angel, apalagi kalo dipungut biaya nanti malah nggak ada yang ikut mbak. Dana itu ya terbatas jumlahnya, cuma buat biaya teknis pelaksanaannya, itupun juga dicukup-cukupkan.”
(wawancara tanggal 22 Oktober 2009)

Ibu Suharti selaku tutor pendidikan keaksaraan fungsional Desa Jumantoro juga mengungkapkan bahwa sebenarnya honor yang diterima tutor sebenarnya kurang untuk mencukupi untuk teknis pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional. Honor tutor pendidikan keaksaraan fungsional hanya cukup untuk biaya transport saat mengajar. Biaya tambahan lainnya yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional, seperti adanya door prize atau snack untuk memotivasi warga belajar agar giat mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional berasal dari dana sukrala tutor atau pewnyelenggara keaksaraan fungsional. Untuk lebih jelasnya berikut wawancaranya :

“....sebenarnya honor tutor hanya cukup untuk beli bensin saja mbak, kadang malah tombok.. Ngajar di KF itu kan sifatnya sosial keamusiaan, membantu sesama jadi ya ngak dihitung secara materi, tapi ada kepuasan batin tersendiri kalo bisa bantu orang lain walaupun harus nombok ya ngak papa. Kadang untuk memotivasi WB saya bawa jajan atau door prize kecil-kecilan, uangnya itu ya dari kantong saya sendiri, karena tidak ada anggaran untuk itu. Tapi itu langsung terbayar dengan perasaan senang dari para WB saat menerima door prize tadi, itu malah nggak ternilai harganya.”
(wawancara tanggal 30 September 2009)

Keterbatasan dana pendidikan keaksaraan fungsional juga berdampak pada kurangnya dana untuk biaya kegiatan praktek keterampilan fungsional. Sehingga kegiatan praktek keterampilan fungsional jarang dilakukan. Selain itu, praktek keterampilan fungsional hanya mengandalkan bahan yang ada dilingkungan sekitar yaitu dengan menggunakan hasil kebun warga belajar atau hasil pertanian yang ada.

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh saudara Ninuk selaku tutor keaksaraan fungsional Desa Jumapolo, sebagai berikut :

“warga belajar itu lebih senang praktek dari pada belajar mbak. Mereka sering bertanya kapan bu praktek lagi? Tapi masalahnya ya di biaya, biaya praktek itu mepet mbak jadi ngak bisa sering-sering praktek. Biasanya cuma sekali dua kali, paling banyak tiga kali selama KF berlangsung, itu pun ya seperti tadi dari bahan sekitar kita.” (wawancara tanggal 30 September 2009)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberantasan buta aksara yang dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo masih terhambat dengan adanya keterbatasan dana pendidikan keaksaraan fungsional. Sehingga dana yang ada harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung keberlangsungan pendidikan keaksaraan fungsional guna memberantas buta aksara di Kecamatan Jumapolo. Selain itu, perlu adanya semangat kemanusiaan dan keiklasan dari para aparat UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo, tutor, penyelenggara dan seluruh stakeholders keaksaraan fungsional dalam bekerja demi kemajuan para warga belajar.

2. Budaya Masyarakat.

Budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemberantasan buta aksara yang dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo. Adanya nilai-nilai sosial yang menghambat pelaksanaan pemberantasan buta aksara seperti kurangnya kesadaran akan arti penting pendidikan bagi dirinya sendiri maupun keluarga. Hal ini terbukti dengan sikap penderita buta aksara yang tidak mau dan malu dalam menginformasikan keadaan yang sebenarnya terjadi pada dirinya bahwa dirinya masih menderita buta aksara. Hal ini terjadi karena mereka anggap bahwa permasalahan buta aksara merupakan suatu hal tabu untuk diperbincangkan. Masyarakat kurang terbuka dalam para petugas yang datang untuk mendata warga masyarakat tersebut. Mereka sering berbelit-belit untuk dimintai keterangan tentang keadaanya. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“kendala kita dalam pemberantasan buta aksara salah satu adalah banyak warga yang tidak mau jujur ke kita mbak. Kalo ada petugas yang mendata, mereka susah dimintai keterangan. Padahal niat kita kan baik ingin membantu mereka lepas dari permasalahan hidupnya. Mungkin mereka malu ke petugasnya, mereka ngak mau

orang lain tau kalo ia masih buta huruf' (wawancara tanggal 22 Oktober 2009)

Bapak Gunawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo menabhahkan bahwa, masyarakat juga beranggapan bahwa pendidikan keaksaraan fungsional kurang bermanfaat terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Banyak orang beranggapan bahwa dengan mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional tidak serta merta dapat menjamin kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi. Untuk lebih jelasnya berikut ini wawancaranya :

“orang desa itu kalo diminta ngubah kebiasannya sulit mbak. Yang biasanya habis dari sawah bisa leye-leyeh sambil dengerin campursari di ganti sinau baca tulis hitung, ya ngak mau begutu saja. Harus dengan pendekatan khusus dan ekstra sabar. Gitu aja kadang masih dipaido, buat apa belajar lagi wong udah tua, ngak bisa jadi pegawai lagi belajar cuma buang-buang waktu dan tenaga.” (wawancara tanggal 22 Oktober 2009)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat tidak jujur mengenai kondisi sebenarnya yang ada pada dirinya. Selain itu warga juga kurang mengetahui arti penting dan manfaat dari pendidikan keaksaraan fungsional, sehingga mereka kurang memperdulikan program tersebut. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya upaya pemberantasan buta aksara yang dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo.

3. Mata Pencaharian.

Mata pencaharian atau pekerjaan seseorang sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar seseorang. Masyarakat Jumapolo kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini berdampak pada berjalannya pendidikan keaksaraan fungsional yang ada. Pada waktu tertentu banyak masyarakat yang sibuk beraktivitas disawah atau ladang sepanjang hari. Sehingga banyak warga yang tidak masuk pendidikan keaksaraan fungsional. Hal ini seperti penuturan Ibu Hastutik tutor keaksaraan fungsional Desa Jatirejo :

“ya ngak setiap pertemuan, warganya bisa masuk full. Apalagi kalo lagi musim tander atau panen, banyak warga belajar yang nggak masuk. Lha gimana wong mereka seharian disawah, pulang-pulang juga sudah capek. Kalo dipaksa belajar tiwas nggak konsen disana malah tidur. ” (wawancara tanggal 30 September 2009)

Selain itu, banyak masyarakat yang pada saat musim kemarau datang pergi merantau untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Hal juga menjadi hambatan tersendiri bagi keberlangsungan pendidikan keaksaraan fungsional. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Titik

selaku Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Kecamatan Jumapolo :

“ awalnya banyak warga yang diusulkan untuk ikut pendidikan keaksaraan fungsional. Setelah ditunggu beberapa bulan dananya baru cair pas musim paceklik, warganya udah keburu pergi merantau ke jakarta ada yang jualan jamu, bakso, kuli bangunan. Lha nanti kalo musim hujan mereka pulang lagi. ” (wawancara tanggal 22 Oktober 2009)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional guna memberantas buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo masih terkendala masalah mata pencaharian warga belajar. Warga lebih mementingkan mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari pada mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional. Pendidikan keaksaraan fungsional tidak bisa berjalan secara efektif karena banyak warga yang tidak masuk. Pihak UPT, tutor dan penyelenggara pun tidak bisa melarang warga belajar untuk bekerja. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi yang baik antara warga belajar dan tutor untuk menentukan waktu belajar yang tepat sehingga pendidikan keaksaraan fungsional bisa berjalan sebagaimana mestinya.

4. Sarana-prasana.

Upaya pemberantasan buta aksara di Kecamatan Jumapolo juga terhambat dengan adanya keterbatasan sarana-prasarana pendukung pendidikan keaksaraan fungsional. pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional masih menumpang pada rumah warga masyarakat setempat. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“ kegiatan pelaksanaan keaksaraan fungsional dilaksanakan ditempat yang telah disepakati antara tutor dan warga belajar. Ada yang dilaksanakan dirumah warga belajar, ada yang dilaksanakan ditempat ibadah, ada yang dilaksanakan di rumah tutornya, ada yang dilaksanakan rumah kepala dusun setempat. Meja dan kursinya kita sekalian pinjam disitu juga. Kalo tidak ada ya lesehan. Lha gimana lagi wong nggak ada sarana itu..” (wawancara tanggal 22 Oktober 2009)

Secara umum sarana-prasana yang diberi oleh pemerintah dalam pendidikan keaksaraan fungsional kurang mencukupi. Warga belajar hanya diberi seperangkat alat tulis yang terdiri dari satu buku tulis dan bolpoin, serta papan tulis. Sedangkan modul pembelajaran sangat terbatas. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Gunawan selaku Penilik Luar Sekolah Kecamatan Jumapolo :

“ya memang ada bantuan sarana-prasarana belajar dari pemerintah tapi itu cuma buku tulis, bolpoin, dan papan tulis yang di

berikan pada saat awal pembelajaran untuk menyemangati para warga belajar. Modulnya ada tapi terbatas, satu modul buat dua orang.” (wawancara tanggal 22 Oktober 2009)

Keterbatasan sarana-prasana dalam kegiatan keakaraan fungsional juga terlihat pada keterbatasan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan fungsional dan alat praktek keterampilan fungsional yang ada. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Suharti selaku tutor pendidikan keaksaraan fungsional desa Jumantoro :

“ kalo masalah sarana dan prasarana belajar ya tentunya masih kurang dari harapan. Kita hanya memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita saat belajar mengajar. Peralatan untuk praktek kita juga pinjam dari warga misalnya kalo praktek masak kita pinjam kompor, wajan, dan alat-alat dapur lainnya dari para warga belajar atau saya bawa sendiri.” (wawancara tanggal 30 September 2009)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sarana-prasana yang dimiliki oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara jumlah sangat terbatas. Hal ini akan berdampak pada kelancaran pendidikan keaksaraan fungsional yang diselenggarakan. Oleh karena itu tutor dituntut untuk bisa aktif dan kreatif untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada disekitar guna menunjang keberhasilan pendidikan keaksaraan fungsional.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa secara umum kinerja UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara berjalan dengan baik. Hal ini dapat dari dapat terlihat dari beberapa indikator kinerja yang berjalan dengan baik, yaitu meliputi produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas pihak UPT PUD NFI dan SD dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional guna memberantasan buta aksara di wilayah Kecamatan Jumapolo.

Produktivitas UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara dengan adanya semangat kerja keras dari para petugasnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional sehingga target pemberantasan buta aksara dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu warga belajar tidak hanya diberi pengetahuan baca tulis hitung (calistung) akan tetapi juga keterampilan fungsional yang dapat dipraktek dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini juga dapat diketahui responsivitas UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara dapat dikatakan baik. Hal ini dapat terbukti dengan adanya sikap tanggap dari para petugas UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan para warga belajar pendidikan keaksaraan fungsional. Kebutuhan warga belajar dalam pendidikan keaksaraan fungsional berbeda dengan kebutuhan anak sekolah. Warga belajar mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga materi yang diberikan merupakan hal-hal yang bersifat praktis dan realistik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penentuan jadwal pembelajaran pihak PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga bersifat flaksibel karena pada umumnya warga belajar memiliki kesibukan yang berbeda-beda, sehingga waktu dan jadwal pembelajaran dilaksanakan menyesuaikan dengan kepentingan warga belajar. Agar pendidikan keaksaraan fungsional dapat terlaksana secara berkesinambungan pihak PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga memberikan motivasi atau rasi belajar kepada para warga belajar.

Akuntabilitas pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara ditunjukkan dengan adanya upaya pencarian data penderita buta aksara seakurat mungkin. Untuk menciptakan pendidikan keaksaraan fungsional yang berkualitas maka tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional direkrut dari orang-orang yang benar kompeten dalam pendidikan keaksaraan fungsional dan benar-benar memahami kondisi masyarakat. Pendaan pendidikan keaksaraan fungsional juga disampaikan secara transparan pada penyelenggara dan warga belajar. Pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo juga melakukan monitoring sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntabilitas secara formal pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo dalam pemberantasan buta aksara ditunjukkan dengan adanya pelaporan pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangnyar, serta pemberian surat keterangan melek aksara (SUKMA) pada warga belajar yang lulus uji kompetensi.

Akan tetapi dalam upaya pemberantasan buta aksara yang dilakukan oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi :

1. Keterbatasan dana pendidikan keaksaraan fungsional. Dana yang dialokasikan dalam pendidikan keaksaraan fungsional bersifat terbatas. Dana yang ada hanya terbatas untuk teknis pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional dan honor tutor juga kurang mencukupi.
2. Budaya masyarakat. Sebagian masyarakat Kecamatan Jumapolo masih menganggap bahwa permasalahan buta aksara adalah sesuatu hal yang sensitif dan merasa malu bila diketahui orang-orang lain. Hal ini

akan menyulitkan petugas dalam proses pendataan jumlah penderita buta aksara.

3. Pekerjaan. Sebagian besar warga belajar bekerja sebagai petani, sehingga pada waktu tertentu, mereka lebih mentingkan untuk bekerja diladang dari pada mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang di berikan oleh pemerintah hanya pada penyediaan ATK pembelajaran, Sedangkan sarana dan prasarana untuk praktek keterampilan fungsional sangat terbatas.

B. Saran.

1. Permasalahan keterbatasan dana dapat diatasi dengan penyerderhanaan bahan ajar yaitu dengan memanfaatkan berbagai hal yang ada di dilingkungan sekitar. Serta menanamkan semangat bekerja keras dengan ikhlas pada para tutor untuk membantu warga belajar agar bisa hidup lebih sejahtera.
2. Untuk mengatasi hambatan yang muncul dari budaya masyarakat yang kurang mendukung terhadap gerakan pemberantasan buta kasara, pihak UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapol harus bekerja sama dan mengintensifkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Kecamatan Jumapolo mulai dari aparat tingkat Rt, Rw, dusun, desa, dan kecamatan untuk membantu sosialisasi pentingnya pemberantasan buta aksara, sehingga masyarakat bisa lebih terbuka dan bersedia mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional.
3. Untuk mengatasi hambatan yang muncul dari pekerjaan warga belajar yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan keaksaraan fungsional maka tutor mengintensifkan komunikasi dengan warga belajar sehingga dapat diketahui jadwal pembelajaran sesuai dengan kepentingan warga belajar
4. Hambatan keterbatasan sarana dan prasarana dalam praktek keterampilan fungsional dapat diatasi dengan menggunakan bahan praktek keterampilan hidup dari bahan-bahan yang ada pada lingkungan sekitar. Di samping itu, keterampilan yang diajarkan dapat digunakan sebagai peluang usaha bagi para warga belajar.